



IMPLEMENTASI
**GERAKAN
LITERASI
SEKOLAH**

di Sekolah Dasar

IMPLEMENTASI GERAKAN LITERASI SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR

PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PERBUKUAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2020

IMPLEMENTASI GERAKAN LITERASI SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR

Penulis

Dr. Uswatun Hasanah, M.Si (Kontributor Utama)

Mirdat Silitonga (Kontributor Anggota)

ISBN: 978-602-0792-79-8

Penyunting

Pratiwi Retnaningdyah, Ph.D.

Kaisar Julizar, S.Sos.

Imelda Widjaja, S.Si.

Tata Letak

Imelda Widjaja, S.Si.

Desain Kover

Genardi Atmadiredja, M.Sn.

Sumber Kover: pxhere

Penerbit:

Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Redaksi:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 19

Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270

Telp. +6221-5736365

Faks. +6221-5741664

Website: <http://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id>

Email: puslitjakbud@kemdikbud.go.id

Cetakan pertama, 2020

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjak/Copyright@2020

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah selesainya laporan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud). Dalam kesempatan ini, saya selaku Kepala Puslitjakdikbud secara khusus menyambut baik atas terselesaikannya penelitian dan penulisan buku tentang “Implementasi Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar”.

Dalam kesempatan ini, selaku Kepala Puslitjakdikbud, saya menyampaikan terima kasih kepada tim peneliti atas kerja kerasnya sehingga penelitian dan penulisan laporan ini dapat selesai tepat pada waktunya. Juga kepada berbagai pihak yang mendukung proses penelitian ini. Kiranya penelitian dan penulisan ini dapat berguna bagi semua pihak. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, Agustus 2020
Plt. Kepala Pusat,

Irsyad Zamjani, Ph.D.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga buku ini dapat selesai dengan baik sesuai harapan. Literasi merupakan kemampuan dasar yang harus dikembangkan pada peserta didik. Gerakan literasi sekolah yang baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia dalam rangka meningkatkan kemampuan literasi pada peserta didik perlu terus disempurnakan. Untuk menyempurnakan atau meningkatkan implementasi gerakan literasi, perlu diukur efektivitas gerakan literasi sekolah dalam meningkatkan kemampuan literasi dasar pada peserta didik. Selain itu, perlu pula diidentifikasi faktor determinan yang berkontribusi terhadap efektivitas implementasi gerakan literasi sekolah. Atas dasar itu maka perlunya penulisan buku dengan judul: “Implementasi Gerakan Literasi Sekolah Di Sekolah Dasar”. Buku ini merupakan bagian dari penelitian yang dilaksanakan di SD yang berada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Pulau Sumbawa

Buku ini disampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban kegiatan sekaligus menyampaikan data dan informasi berdasarkan hasil penelitian. Semoga informasi dan rekomendasi yang disampaikan dalam buku ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kebijakan sekaligus menyusun rekomendasi kebijakan tentang Gerakan Literasi Sekolah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pusat Penelitian Kebijakan Kemendikbud, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Sasaran, Kepala Sekolah, Guru, dan para siswa, serta pihak lain yang terlibat dalam peulisan buku ini.

Jakarta, Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	III
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KONSEP LITERASI	9
A. Pengertian Literasi	9
B. Komponen Literasi	10
C. Dimensi Literasi Dasar	13
D. Keterampilan Literasi	14
E. Tingkatan Literasi	15
F. Prinsip Pendidikan Literasi	16
BAB III LITERASI DI INDONESIA	19
BAB IV GERAKAN LITERASI SEKOLAH	25
A. Pengertian Gerakan Literasi Sekolah	25
B. Strategi Gerakan Literasi Sekolah	26

C. Tahapan Gerakan Literasi Sekolah	28
D. Faktor yang memengaruhi keberhasilan Gerakan Literasi Sekolah	32
BAB V IMPLEMENTASI DAN EVALUASI GERAKAN LITERASI SEKOLAH	37
A. Gambaran Faktor Determinan GLS di Indonesia	37
B. Gambaran Implementasi GLS di Indonesia	65
C. Gambaran Kemampuan Literasi Siswa di Indonesia	68
D. Faktor Determinan GLS di Indonesia	72
E. Evaluasi Gerakan Literasi Sekolah	75
BAB VI PENUTUP	77
DAFTAR PUSTAKA	81
GLOSARIUM	89

BAB I PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu kunci pertumbuhan ekonomi. Hanushek & Wobmann (2013) menyatakan bahwa indikator pendidikan yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi bukanlah persentase jumlah penduduk yang menempuh pendidikan formal, namun hal yang menentukan kemajuan pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah kemampuan kognitif penduduk yang merupakan hasil dari pendidikan. Moretti & Frandell (2013) menegaskan bahwa pendidikan yang dimaksud adalah mampu memahami, membaca, menulis dan menghitung. Keterampilan hidup yang penting ini diterjemahkan ke dalam istilah yang lebih luas menjadi melek/literasi (*literate*).

“*Literacy for all*” merupakan slogan yang dikumandangkan United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO). Slogan ini menegaskan hak setiap manusia untuk menjadi “*literate*” sebagai modal untuk menyongsong kehidupan. Literasi membuat individu, keluarga, dan masyarakat berdaya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Lebih jauh, literasi memiliki *multiplier effect*, yakni memberantas kemiskinan, mengurangi angka kematian anak, mengekang pertumbuhan penduduk, mencapai kesetaraan gender dan menjamin pembangunan berkelanjutan, perdamaian, dan demokrasi (UNESCO, 2014).

UNESCO melakukan survei pada 2012. Hasilnya menunjukkan bahwa indeks membaca masyarakat Indonesia adalah 0,001. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang membaca serius. Indonesia menduduki peringkat terendah kedua, hanya setingkat di atas Botswana di Afrika. Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum - WEF) pada 2015 juga mengeluarkan laporan mengenai kecakapan yang harus dikuasai untuk menghadapi abad ke-21. Keterampilan itu mencakup literasi, kompetensi, dan karakter. Hasil survei The World's Most Literate Nations (WMLN) 2016 mengungkapkan bahwa minat baca di Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara. Sementara Finlandia, Norwegia, Islandia, Denmark, dan Swedia secara berturut-turut menduduki peringkat satu sampai dengan peringkat lima. Rendahnya budaya literasi di Indonesia membuat pendidikan di Indonesia tertinggal dari negara-negara lain.

Pentingnya literasi dalam konteks menentukan mutu sumber daya manusia untuk modal memajukan bangsa. Fokus pemerintah adalah mendorong anak memahami materi yang dibacanya dengan membuat kebijakan pendidikan yang mengarah pada kecakapan abad ke-21 (literasi, kompetensi, dan karakter) dan hal tersebut diformulasikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Sejak tahun 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginisiasi lahirnya Gerakan Indonesia Membaca dan Gerakan Literasi Nasional (GLN). Gerakan Indonesia Membaca melingkupi gerakan literasi di ranah masyarakat dan keluarga serta Gerakan Literasi Nasional (GLN) sebagai bagian dari implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membentuk kelompok kerja Gerakan Literasi Nasional (GLN) untuk mengoordinasikan berbagai kegiatan literasi yang dikelola unit-unit kerja terkait. Kegiatan literasi tersebut mencakup Gerakan Literasi Masyarakat (GLM), Gerakan Literasi Keluarga (GLK), dan Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Ferguson (2003)

menjabarkan bahwa komponen literasi informasi terdiri atas literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual.

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang ditetapkan oleh pemerintah sejak tahun 2016 diharapkan dapat mengatasi permasalahan rendahnya kemampuan literasi peserta didik. GLS yang dilakukan secara serentak, bersinambungan, melibatkan para pihak terkait dengan mengerahkan segenap sumber daya diharapkan dapat meningkatkan kemampuan literasi dasar, yaitu literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial dan literasi budaya dan kewargaan. GLS yang efektif dipengaruhi atau ditentukan faktor-faktor lain, di antaranya *self-directed learning* pada diri siswa, sarana prasarana penunjang literasi, pembiayaan program literasi, komitmen pendidik dalam implementasi GLS di sekolah, partisipasi masyarakat, literasi dalam keluarga dan dukungan pemerintah.

Kemampuan literasi dasar peserta didik dipengaruhi oleh kemampuan belajar secara mandiri atau yang dikenal dengan istilah *self-directed learning*. Istilah *self-directed learning* (SDL) banyak ditemukan dalam literatur psikologi pendidikan orang dewasa (Jossberger, et al., 2010). Menurut Gibbons (2002), SDL merupakan suatu keterampilan dimana seseorang mampu untuk menentukan sendiri dan memilih tujuan yang ingin dicapainya, merencanakan strategi yang akan dilakukan, berusaha untuk memecahkan masalah, memanajemen dirinya, serta mengevaluasi pemikiran dan kinerja yang telah dilakukan. Keterampilan ini akan meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan prestasi individu (Gibbons, 2002). *Self-directed learning* (SDL) sangat dibutuhkan peserta didik untuk menyelesaikan tugas belajarnya. Peserta didik yang mempunyai kebiasaan membaca atau memiliki literasi yang baik merupakan peserta didik yang tidak bergantung sepenuhnya pada orang lain. Mereka akan memiliki inisiatif sendiri untuk terus mencari, menemukan dan memilih apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan mereka, seperti bahan bacaan apa yang dibutuhkan, dan berusaha memenuhi kebutuhan bacaan tersebut. Selain itu, mereka juga terampil dalam mengatur waktu kegiatan membaca atau

belajarnya. Temuan Hyland & Kranzow (2011) mengungkapkan bahwa *SDL* memberi pengaruh positif terhadap performa akademik pada peserta didik. Demikian halnya untuk kemampuan literasi, *SDL* merupakan salah satu faktor kunci dalam peningkatan kemampuan literasi pada peserta didik.

Literasi dasar merupakan kualitas atau kemampuan melek huruf/aksara yang di dalamnya meliputi kemampuan membaca dan menulis. Namun rendahnya budaya literasi di Indonesia membuat pendidikan di Indonesia tertinggal dari negara-negara tetangga. Hal ini terlihat pada siswa Indonesia dalam kemampuan matematika pada tahun 1999 hanya mampu menempati peringkat 34 dari 38 negara. Pada tahun 2003 kemampuan matematika siswa Indonesia berada pada peringkat 35 dari 46 negara. Hal-hal yang menjadi pengaruh diantaranya adalah tidak tersedianya sarana literasi di lingkungan siswa, seperti di sekolah, rumah dan tempat bermain. Padahal bila dilihat dari aspek-aspek Gerakan Literasi Nasional, seperti literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, budaya dan kewarganegaraan, maka sarana literasi dirasa sangat penting untuk mendukung pencarian informasi. Sarana-sarana pendukung yang dimaksud diantaranya adalah, buku-buku, sudut buku baca, perpustakaan umum, jaringan internet untuk memudahkan pencarian menggunakan HP/ Laptop dan lainnya. Sarana mempermudah seseorang untuk mencari informasi.

Faktor penting lain yang memengaruhi literasi dasar adalah biaya. Harris Iskandar Dirjen PAUD dan Dikmas (2018) mengatakan desa miskin menjadi sumber kantong dengan warga yang buta aksara. Data tersebut menunjukkan pentingnya dana atau pembiayaan untuk membantu seseorang dalam melakukan literasi. Kebutuhan dana dalam melakukan literasi di antaranya adalah seperti membeli buku, membangun perpustakaan mini di rumah, membeli alat digital untuk memenuhi kebutuhan informasi digital dan lain sebagainya.

Komitmen guru dibutuhkan dalam terlaksananya literasi dengan baik di sekolah tidak terlepas dari tim penggerak literasi di sekolah, di mana salah satu dari tim tersebut adalah guru. Berdasarkan temuan Harahap et

al (2017) komitmen guru akan memengaruhi berjalan atau tidaknya program literasi di sekolah. Guru harus mempunyai semangat membaca yang baik. Sebaliknya guru juga bisa menjadi faktor penghambat. Kerjasama dan komitmen guru yang kurang baik akan menghambat terlaksananya program literasi sekolah. Guru harus berkomitmen dengan setiap Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan literasi sekolah. Komitmen dari para guru memiliki pengaruh yang kuat dalam pelaksanaan suatu program. Para pelaku kebijakan harus memiliki kemampuan manajerial dan komitmen terhadap tujuan yang akan dicapai (Sudiyono, 2007). Begitu juga dengan komitmen guru dalam pelaksanaan Program Gerakan Literasi Sekolah. Faktor penting yang harus dimiliki guru adalah pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana kebijakan (Saputro, 2018). Jika guru memiliki komitmen yang baik terhadap Program Gerakan Literasi Sekolah, besar kemungkinan program tersebut akan berjalan sesuai harapan.

Terlaksananya Program Gerakan Literasi Sekolah juga dipengaruhi oleh faktor partisipasi masyarakat. Masyarakat harus aktif dalam mendukung terlaksananya program tersebut. Menurut Isbandi (Rizal, 2014) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasi masalah, dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi masyarakat menurut Theresia (Astuti, 2017:13) adalah perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Temuan Arsah dan Nurrisati (2018) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh terhadap kegiatan literasi pada perpustakaan.

Kemampuan literasi anak merupakan suatu proses yang dapat dimulai

pada saat anak lahir dan terus berkembang selama masa hidupnya. Kemampuan membaca dapat membantu anak untuk lebih mudah belajar membaca dan meningkatkan tingkat kesuksesan anak di sekolah (Senechal & LeFevre, 2002). Kemampuan literasi anak dapat ditumbuhkan dengan adanya motivasi awal untuk membaca. Dorongan kepada anak untuk mengenalkan membaca dapat memberikan pengaruh yang positif kepada anak. Dorongan dan motivasi dapat dilakukan oleh lingkungan keluarga. Karena jika lingkungan keluarga dapat memperkenalkan anak kepada bahan bacaan, maka anak akan dapat tergerak untuk melakukan kegiatan membaca. Dalam penjelasan (Muktiono, 2003: 16) menyatakan bahwa membaca buku dapat dikembangkan agar menjadi kegiatan yang melibatkan banyak orang, motivasi dan dorongan dari dalam individu yang membuat kegiatan ini dapat dilakukan. Oleh karena itu literasi keluarga dapat memengaruhi kemampuan literasi dasar pada anak. Hasanah dkk (2018) berpendapat bahwa pelibatan orang tua dalam kegiatan literasi juga dapat dilakukan dalam bentuk pendampingan implementasi literasi. Contohnya adalah dengan mengintensifkan waktu bersama keluarga dengan membiasakan keluarga untuk berdiskusi, berkomunikasi, dan berbagi informasi antar anggota keluarga mengenai budaya dan kewargaan. Secara tidak langsung hal ini akan membangun pemahaman terkait dengan literasi dan menumbuhkan kemampuan literasi dasar pada anak.

Literasi dasar pada siswa tak lepas dari peran pemerintah dalam upaya menumbuhkan minat baca masyarakat sehingga tumbuh menjadi masyarakat yang literat dan memiliki budaya literasi yang tinggi. Sejumlah upaya pemerintah dilakukan untuk secara bertahap menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap literasi. Salah satunya tertuang dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan budi Pekerti, yang dimana mewajibkan siswa untuk membaca 15 menit sebelum proses belajar. Selain itu, kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menelurkan kebijakan berupa Gerakan Literasi Nasional. Gerakan Literasi Nasional diimplementasikan

dalam bentuk Gerakan Literasi Sekolah, Gerakan Literasi Masyarakat, dan Gerakan Literasi Bangsa. Gerakan Literasi Sekolah yang dicanangkan pemerintah menekankan pada kegiatan literasi yang mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital dan auditori (Kemendikbud, 2016). Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah juga memerlukan peran pemerintah agar kebijakan tersebut dapat terlaksana. Seperti halnya Gerakan Literasi Sekolah ini, peran pemerintah sangat vital mulai dari sosialisasi, pemenuhan sarana prasarana, monitoring hingga evaluasi (Kemendikbud, 2017). Melalui kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan siswa dapat memiliki keterampilan literasi dasar, seperti literasi baca dan tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, literasi budaya dan kewarganegaraan.

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) memiliki tujuan untuk menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam Gerakan Literasi Sekolah (GLS) agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dilakukan dalam 3 tahap, yaitu tahap pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Tahapan ini dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sekolah. Kesiapan ini mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi GLS, yang menjadi variabel dalam penelitian ini, yaitu : sarana literasi, partisipasi masyarakat, komitmen guru, pembiayaan, *self directed learning*, literasi keluarga, dukungan pemerintah, dan Peran Kepala Sekolah.

Penelitian yang berjudul: "Implementasi Gerakan Literasi Sekolah Di Sekolah Dasar" dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi tentang faktor determinan yang dalam implementasi gerakan literasi sekolah serta pengaruhnya terhadap kemampuan literasi siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menyempurnakan atau meningkatkan implementasi gerakan literasi . Oleh karena itu perlu diukur seberapa besar determinasi *self-directed learning*, sarana literasi, dukungan keuangan sekolah, komitmen pendidik,

Peran Kepala Sekolah, partisipasi masyarakat, literasi keluarga, dukungan pemerintah terhadap implementasi gerakan literasi sekolah, serta seberapa besar determinan implementasi gerakan literasi sekolah terhadap kemampuan literasi siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan menggunakan instrument berbentuk angket. Sebagai instrument tambahan menggunakan wawancara, observasi dan tes kemampuan literasi. Responden penelitian ini sebanyak 300 siswa SD, 60 orang guru SD dan 15 kepala sekolah yang tersebar di Tapanuli Utar, (Sumatera Utara), Singkawang (Kalimantan Barat), Makassar (Sulawesi Selatan), Sumbawa (Nusa Tenggara Barat), dan Malang (Jawa Timur). diidentifikasi faktor determinan yang berkontribusi terhadap efektivitas implementasi gerakan literasi sekolah.

BAB II KONSEP LITERASI

A. PENGERTIAN LITERASI

Kata literasi berasal dari bahasa Inggris *Literacy* yang merupakan kualitas atau kemampuan melek huruf/aksara yang di dalamnya meliputi kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan membaca dan menulis merupakan kompetensi utama yang menjadi simbol pendidikan dasar atau umum pada abad lampau. Seiring berkembang zaman, pemahaman terkait literasi juga semakin berkembang. Literasi tidak hanya diartikan sebagai membaca dan menulis saja, mulai banyak ahli-ahli yang mendefinisikan literasi.

Untuk pertama kalinya definisi tentang literasi disepakati secara internasional, berasal dari rekomendasi UNESCO tahun 1958 dan terus berkembang hingga tahun 2003. Menurut UNESCO (2004), literasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, berkomunikasi dan menghitung, menggunakan dicetak dan menulis bahan-bahan yang terkait dengan konteks yang berbeda-beda. UNESCO menjelaskan bahwa kemampuan literasi merupakan hak setiap orang dan merupakan dasar untuk belajar sepanjang hayat.

The National Literacy Act (1991) mendefinisikan literasi sebagai kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan

memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga dan masyarakat, untuk mencapai tujuan-tujuan seseorang, dan untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi seseorang. Dari definisi ini terkandung makna bahwa definisi literasi bergantung pada keterampilan yang dibutuhkan dalam lingkungan tertentu. Literasi menurut Kemendikbud (2016) adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis dan berbicara.

Kehidupan masyarakat di era globalisasi ditandai oleh kehidupan yang sangat akrab dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni telah menuntut warganya untuk memiliki kemampuan dasar agar dapat bertahan di tengah masyarakat. Menurut Depdiknas (2004), literasi diartikan sebagai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan tidak untuk dapat sekedar hidup dari segi finansial, tetapi juga sebagai suatu yang dibutuhkan untuk mengembangkan diri secara sosial, ekonomi dan budaya dalam kehidupan modern. Kemampuan literasi dapat memberdayakan dan meningkatkan kualitas individu, keluarga, dan masyarakat. Literasi adalah keberaksaraan yang sifatnya *multiple effect*, yaitu memberikan efek untuk ranah yang sangat luas, kemampuan literasi membantu kemiskinan, mengurangi angka kematian anak, pertumbuhan penduduk dan menjamin pembangunan berkelanjutan, dan terwujudnya perdamaian. Buta huruf adalah hambatan untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Berdasarkan definisi diatas dapat diartikan bahwa literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, berkomunikasi, dan menghitung, serta membaca agar dapat mengembangkan diri secara sosial, ekonomi, dan budaya dalam kehidupan modern sehingga menjadi pribadi yang berkualitas.

B. KOMPONEN LITERASI

Literasi di era sekarang ini lebih dari sekedar membaca, menulis dan menghitung, namun mencakup keterampilan berfikir menggunakan

sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital dan auditori. Kemampuan tersebut dinamakan literasi informasi.

Pada deklarasi UNESCO, disebutkan literasi informasi terkait dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, menentukan, menemukan, mengevaluasi, menciptakan secara efektif dan terorganisasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi untuk mengatasi berbagai persoalan. Kemampuan tersebut perlu dimiliki oleh tiap individu sebagai syarat untuk berpartisipasi dalam masyarakat informasi, dan itu bagian dari hak dasar manusia menyangkut pembelajaran sepanjang hayat.

Menurut Clay dan Ferguson dalam Kemendikbud (2016), komponen literasi informasi terdiri atas:

1. Literasi dini (*Early Literacy*)

Kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah. Pengalaman peserta didik dalam berkomunikasi dengan bahasa ibu menjadi fondasi perkembangan literasi dasar.

2. Literasi Dasar (*Basic Literacy*)

Kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung (*counting*) berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan (*calculating*), mempersepsikan informasi (*perceiving*), mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi (*drawing*) berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi.

3. Literasi Perpustakaan (*Library Literacy*)

Kemampuan memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan nonfiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami Dewey Decimal System sebagai klasifikasi pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan perpustakaan, memahami penggunaan katalog dan pengindeksan, hingga memiliki pengetahuan

dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah.

4. Literasi Media (*Media Literacy*)

Kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik (media radio, media televisi), media digital (media internet), dan memahami tujuan penggunaannya.

5. Literasi Teknologi (*Technology Literacy*)

Kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras (*hardware*), peranti lunak (*software*), serta etika dalam memanfaatkan teknologi. Berikutnya, kemampuan dalam memahami teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet. Dalam praktiknya, juga pemahaman menggunakan komputer (*computer literacy*) yang di dalamnya mencakup menghidupkan dan mematikan komputer, menyimpan dan mengelola data, serta mengoperasikan program perangkat lunak. Sejalan dengan membanjirnya informasi karena perkembangan teknologi saat ini, diperlukan pemahaman yang baik dalam mengelola informasi yang dibutuhkan masyarakat.

6. Literasi Visual (*Visual Literacy*)

Pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi, yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat. Tafsir terhadap materi visual yang tidak terbandung, baik dalam bentuk cetak, auditori, maupun digital (perpaduan ketiganya disebut teks multimodal), perlu dikelola dengan baik. Bagaimanapun di dalamnya banyak manipulasi dan hiburan yang benar-benar perlu disaring berdasarkan etika dan kepatutan.

C. DIMENSI LITERASI DASAR

Literasi memiliki arti luas, sehingga keberaksaraan bukan lagi bermakna tunggal melainkan mengandung beragam arti. Berdasarkan Panduan Gerakan Literasi Nasional (Kemendikbud, 2016), ada enam dimensi dalam literasi dasar yaitu:

1. Literasi Baca dan Tulis

Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial.

2. Literasi Numerasi

Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk (a) bisa memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan, dan mengomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari; (b) bisa menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, dsb.) untuk mengambil keputusan.

3. Literasi Sains

Literasi sains adalah pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains, membangun kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual dan budaya, serta meningkatkan kemauan untuk terlibat dan peduli dalam isu-isu yang terkait sains.

4. Literasi Digital

Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.

5. Literasi Finansial

Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan (a) pemahaman tentang konsep dan risiko, (b) keterampilan, dan (c) motivasi dan pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat.

6. Literasi Budaya dan Kewarganegaraan

Literasi budaya adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Sementara itu, literasi kewargaan adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat.

D. KETERAMPILAN LITERASI

Menurut *National Center for Education Statistics (NCES) (2007)*, terdapat tujuh kunci dasar dalam literasi, yaitu :

1. *Text search skills*, yaitu keterampilan mencari teks. Mencari teks secara efisien.
2. *Basic reading: Decoding and recognizing word fluently*, yaitu dasar-dasar membaca. Menemukan dan mengucapkan dengan lancar
3. *Language skills* yaitu keterampilan bahasa. Memahami struktur dan maksud kalimat yang berhubungan dengan kalimat lainnya.

4. *Inferential skills: Drawing appropriate text-based inferences.* (keterampilan inferensial, merupakan keterampilan menggambar teks yang sesuai berdasarkan inference)
5. *Application skills Applying* yaitu keterampilan aplikasi. Menerapkan hal baru dengan teliti, disimpulkan, atau informasi dihitung untuk menyelesaikan berbagai tujuan.
6. *Computation identification skills* yaitu keterampilan mengidentifikasi perhitungan. Mengidentifikasi perhitungan-perhitungan yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan kuantitatif.

E. TINGKATAN LITERASI

Literasi tidak muncul begitu saja sejak lahir. Proses ini dimulai dari kecil dan dari lingkungan keluarga, lalu didukung atau dikembangkan di sekolah, lingkungan pergaulan, dan lingkungan pekerjaan. Literasi setiap orangpun tidak sama karena literasi memiliki tingkatan-tingkatan yang menanjak. Jika seseorang sudah menguasai satu tahapan literasi maka ia memiliki pijakan untuk naik ke tingkatan literasi berikutnya. Wells (1987) menyebutkan bahwa terdapat empat tingkatan literasi, yaitu:

1. *Performative*
Orang yang tingkat literasinya berada pada tingkat performatif, ia mampu membaca dan menulis, serta berbicara dengan simbol-simbol yang digunakan (bahasa).
2. *Functional*
Pada tingkat functional orang diharapkan dapat menggunakan bahasa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari seperti membaca buku manual.
3. *Informational*
Pada tingkat informational orang diharapkan dapat mengakses pengetahuan dengan bahasa.
4. *Epistemic*

Pada tingkat epistemic orang dapat mentransformasikan pengetahuan dalam bahasa. Dengan demikian tingkatan literasi dimulai dari tingkatan paling bawah yaitu performatif, functional, informational, dan epistemic.

F. PRINSIP PENDIDIKAN LITERASI

Menurut Kern (2000) terdapat tujuh prinsip pendidikan literasi, yaitu:

1. Literasi melibatkan interpretasi
Penulis/pembicara dan pembaca/pendengar berpartisipasi dalam tindak interpretasi, yakni: penulis/ pembicara menginterpretasikan dunia (peristiwa, pengalaman, gagasan, perasaan, dan lain-lain), dan pembaca/pendengar kemudian menginterpretasikan interpretasi penulis/pembicara dalam bentuk konsepsinya sendiri tentang dunia.
2. Literasi melibatkan kolaborasi
Terdapat kerjasama antara dua pihak yakni penulis/pembicara dan membaca/pendengar. Kerjasama yang dimaksud itu dalam upaya mencapai suatu pemahaman bersama. Penulis/pembicara memutuskan apa yang harus ditulis/ dikatakan atau yang tidak perlu ditulis/ dikatakan berdasarkan pemahaman mereka terhadap pembaca/pendengarnya. Sementara pembaca/pendengar mencurahkan motivasi, pengetahuan, dan pengalaman mereka agar dapat membuat teks penulis bermakna.
3. Literasi melibatkan konvensi
Orang-orang membaca dan menulis atau menyimak dan berbicara itu ditentukan oleh konvensi/kesepakatan kultural (tidak universal) yang berkembang melalui penggunaan dan dimodifikasi untuk tujuan-tujuan individual. Konvensi disini mencakup aturan-aturan bahasa baik lisan maupun tertulis.

4. Literasi melibatkan pengetahuan kultural

Membaca dan menulis atau menyimak dan berbicara berfungsi dalam sistem-sistem sikap, keyakinan, kebiasaan, cita-cita, dan nilai tertentu. Sehingga orang-orang yang berada di luar suatu sistem budaya itu rentan/beresiko salah dipahami oleh orang-orang yang berada dalam sistem budaya tersebut.

5. Literasi melibatkan pemecahan masalah

Karena kata-kata selalu melekat pada konteks linguistik dan situasi yang melingkupinya, maka tindak menyimak, berbicara, membaca, dan menulis itu melibatkan upaya membayangkan hubungan-hubungan di antara kata-kata, frase-frase, kalimat-kalimat, unit-unit makna, teks-teks, dan dunia. Upaya membayangkan/memikirkan/mempertimbangkan ini merupakan suatu bentuk pemecahan masalah.

6. Literasi melibatkan refleksi dan refleksi diri

Pembaca/pendengar dan penulis/pembicara memikirkan bahasa dan hubungan-hubungannya dengan dunia dan diri mereka sendiri. Setelah mereka berada dalam situasi komunikasi mereka memikirkan apa yang telah mereka katakan, bagaimana mengatakannya, dan mengapa mengatakan hal tersebut.

7. Literasi melibatkan penggunaan bahasa.

Literasi tidaklah sebatas pada sistem-sistem bahasa (lisan/tertulis) melainkan mensyaratkan pengetahuan tentang bagaimana bahasa itu digunakan baik dalam konteks lisan maupun tertulis untuk menciptakan sebuah wacana/diskursus.

BAB III LITERASI INDONESIA

Budaya membaca dan menulis (Literasi) telah tertanam sejak lama di kehidupan bangsa Indonesia. Cikal bakal budaya membaca telah ada sejak bertahun-tahun lalu. Masyarakat mengenal tradisi membaca berbagai serat, layang dan kitab dalam berbagai ritual keagamaan maupun adat. Cikal bakal budaya menulis juga telah tertanam sejak dulu dengan ditemukannya berbagai prasasti yang menggunakan aksara latin dan aksara palawa di berbagai prasasti yang ditemukan. Hal ini menjadi bukti bahwa budaya membaca dan menulis telah ada sejak dulu.

Pada masa kolonial, literasi semakin dikembangkan dengan adanya sekolah untuk anak laki-laki terpilih dan pada pelajar memiliki kewajiban untuk membaca buku. Misalnya bagi murid *Algemeene Middelbare School* (AMS) Hindia Belanda Yogyakarta sebanyak 25 judul buku dan AMS Hindia Belanda Malang sebanyak 15 judul buku. Kaum perempuan, yang diinisiasi oleh R.A Kartini, beliau rajin membaca buku dan menuliskan surat untuk sahabatnya di Belanda hingga kemudian tulisannya dijadikan buku dengan judul "Habis Gelap. Terbitlah Terang". Perlawanan bangsa Indonesia pun dimulai dengan banyaknya produk-produk tulisan para tokoh pejuang dan penulis surat kabar cetak yang sangat kritis terhadap pemerintah kolonial Belanda.

Pejuang bangsa Indonesia, contohnya Soekarno dan Hatta pun memiliki kecerdaan dan keberanian dalam memerdekakan Indonesia sebab kegemarannya membaca. Membaca mampu menjadikan seseorang bersinergi dengan lingkungannya. Melalui membaca dan menulis mampu memengaruhi pemikiran seseorang, menumbuhkan budaya kritis hingga melahirkan masyarakat yang cerdas dan memiliki daya saing. Pada masa Kemerdekaan Indonesia, Presiden Sukarno sangat bersemangat membangun negara dengan tidak lagi mengangkat senjata tetapi mengangkat pena dan buku untuk memberantas buta huruf di kalangan masyarakat biasa.

Pasca kemerdekaan 1945, angka buta aksara di Indonesia sangat tinggi. Pemerintah membangun fasilitas pendidikan formal untuk anak usia sekolah guna memberantas buta aksara. Pada tahun 1945, dicanangkan program Pemberantasan Buta Huruf (PBH). Pada saat itu program pemberantasan buta aksara masih menggunakan pola tradisional, yaitu orang lebih dulu belajar membaca daripada belajar menulis. Setelah ia memperoleh kecakapan baca-tulis, baru mempergunakannya untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian serta untuk mempelajari suatu kejuruan, Program pemberantasan buta huruf berdasarkan pola kerja demikian menurut kalangan pendidikan orang dewasa di dunia disebut PBH Tradisional (Traditional literacy). PBH tradisional hanya difokuskan pada usaha program aksara, angka, bahasa, dan pengetahuan dasar. Program tersebut menekan angka 90% buta huruf menjadi 40% di tahun 1960an. Kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan komando bahwa Indonesia harus terbebas dari buta huruf Pada tahun 1964. Dalam upaya keberaksaraan dan keberdayaan, pada tahun 1966 hingga tahun 1970 Pemerintah melaksanakan strategi Pemberantasan Buta Huruf (PBH) Fungsional yang dimaksudkan untuk mengajarkan keaksaraan dengan berorientasi pada pekerjaan. Sasaran PBH Fungsional pada saat itu adalah para pekerja yang buta aksara dari berbagai sector, program PNH bergeser ke pemanfaatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dipelajari untuk kehidupannya.

Pada masa Orde Baru, tahun 1970 dirintis program Paket A yang

merupakan respons atas kenyataannya yang terjadi yaitu kemampuan dan budaya membaca masih rendah, ketersediaan bukunya pun masih rendah, terutama buku-buku yang berkaitan dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat. Program kejar Paket A berisi semua segi kehidupan masyarakat dan merupakan alternatif yang paling efektif guna memberantas 3 (tiga) buta sekaligus yaitu buta aksara latin dan angka arab, buta bahasa Indonesia, dan buta pendidikan dasar. Pada tahun 1973, diterbitkan instruksi Presiden nomor 10 tahun 1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar. Pada saat itu infrastruktur dan fasilitas pendidikan dibangun dalam skala besar sehingga menarik banyak anak usia sekolah untuk bersekolah. Namun 10 tahun kemudian, angka putus sekolah dasar cukup tinggi. Oleh karena itu pada 2 Mei 1984, Presiden Soeharto mencanangkan program wajib belajar enam tahun.

Upaya pemberantasan buta aksara yang dilakukan sejak pasca kemerdekaan dilakukan karena bangsa ini meyakini bahwa naskah atau buku-buku yang berisi tulisan merupakan tempat terbaik menyimpan pengetahuan (Damayantie, 2020). Naskah atau buku berfungsi sebagai perantara pengetahuan, pembentuk karakter bangsa melalui nilai-nilai yang tersirat di dalamnya, serta sarana hiburan. Keberadaan naskah atau buku-buku tidak terlepas dari aktivitas membaca dan menulis serta pelakunya.

Melalui pendidikan formal dan informal, angka melek aksara terus meningkat. Pada tahun 2002 angka melek aksara masyarakat Indonesia mencapai 89,51%. Guna meningkatkan angka melek aksara, maka pada tahun 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Pemberantasan buta aksara dalam skala Nasional mengalami perubahan pesat. Pada akhir tahun 2008, jumlah penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas tinggal 9.763.256 atau 5,97%.

Budaya membaca dan menulis sudah ditanamkan melalui berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah dalam memberantas buta aksara di

Indonesia. Namun itu tidak serta merta menjadikan bangsa ini bebas buta aksara dan memiliki eksistensi literasi yang membanggakan. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia yang masih buta aksara sebanyak 3,56% atau sekitar 5,7 juta jiwa. Selain itu berbagai survei dan penelitian menunjukkan budaya literasi bangsa ini masih rendah.

UNESCO melakukan survei pada 2012, hasilnya menunjukkan bahwa indeks membaca masyarakat Indonesia adalah 0,001. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang membaca serius. Hasil survei *The World's Most Literate Nations (WMLN)* 2016 mengungkapkan bahwa minat baca di Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara. Sementara Finlandia, Norwegia, Islandia, Denmark, dan Swedia secara berturut-turut menduduki peringkat satu sampai dengan peringkat lima.

Capaian literasi matematika siswa tetap rendah pada *PISA* yang diselenggarakan tahun 2000 berada pada peringkat 39 dari 41 negara peserta, tahun 2003 berada di peringkat 38 dari 40 negara, serta peringkat 50 dari 57 negara peserta pada tahun 2006 (Puspendik, 2012). Tahun 2012 semakin terpuruk menjadi peringkat 64 dari 65 negara. Hal tersebut semakin mengokohkan pandangan rendahnya minat baca masyarakat Indonesia. Terlebih, skor literasi membaca siswa Indonesia (berusia 15 tahun) itu hanya 396, jauh di bawah standar rata-rata 496.

Angka UNDP juga mengejutkan bahwa angka melek huruf orang dewasa di Indonesia hanya 65,5 persen saja. Sedangkan Malaysia sudah 86,4 persen. Rendahnya budaya literasi di Indonesia membuat pendidikan di Indonesia tertinggal dari negara-negara tetangga. Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, kemampuan membaca anak usia 15 tahun hanya 37,6 persen anak membaca tanpa bisa menangkap makna. Dalam persoalan menulis, Indonesia hanya mampu menghasilkan 8.000 buku per tahun, tertinggal dari Vietnam yang mampu menghasilkan 15.000 buku per tahun.

Rendahnya literasi di Indonesia berdasarkan berbagai survei dan penelitian, mendorong Pemerintah melakukan perubahan pada fokus

pemberantasan buta aksara. Pada bulan Juli 2015, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Salah satu kegiatan wajib yang terdapat di dalam Permendikbud tersebut adalah membaca 15 menit buku non pelajaran setiap hari. Hal ini bertujuan untuk memberantas buta aksara dan meningkatkan kemampuan literasi siswa. Pendidikan keaksaraan lanjutan juga diatur dalam Permendikbud Nomor 42 Tahun 2015. Untuk Pengembangan budaya baca dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah memberikan layanan program kampung literasi, sarana ruang baca publik seperti Taman Bacaan Masyarakat (TBM) rintisan dan TBM Penguatan, dan untuk menggaungkan budaya membaca masyarakat, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah mengadakan Gerakan Indonesia Membaca (GIM) di tingkat Kabupaten/Kota. Pada tahun 2018, [Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan \(Kemdikbud\)](#) mencatat angka buta aksara tinggal sekitar 2,068%, Sehingga dari prosentase sisanya dapat dikatakan tinggal sekitar 3,474 juta orang yang masih buta aksara. (Di bagian ini terasa ada pengulangan dari bab sebelumnya yang juga menyinggung asal usul lahirnya GLS).

BAB IV

GERAKAN LITERASI SEKOLAH

A. PENGERTIAN GERAKAN LITERASI SEKOLAH

Dalam dunia pendidikan, literasi menjadi sarana bagi siswa dalam mengenal, memahami, dan menerapkan ilmu yang didapatkannya di bangku sekolah. Pentingnya literasi bagi siswa membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengembangkan Gerakan Literasi Sekolah (GLS).

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik (Kemendikbud, 2016:2). Gerakan literasi sekolah adalah gerakan sosial dengan dukungan kolaboratif berbagai elemen, yaitu melibatkan siswa, pendidikan dan tenaga kependidikan, serta orang tua. Upaya yang ditempuh untuk mewujudkannya berupa pembiasaan membaca peserta didik sebagai budaya di lingkungan sekolah (Kemendikbud, 2016:7),

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti memperkuat upaya pembentukan budaya literasi tersebut, yaitu pada bagian mengembangkan potensi diri peserta didik secara utuh yang berbunyi :

“Setiap siswa mempunyai potensi yang beragam. Sekolah hendaknya

memfasilitasi secara optimal agar siswa bisa menemukan dan mengembangkan potensinya. Kegiatan wajib: a. Menggunakan 15 menit sebelum hari pembelajaran untuk membaca buku selain buku mata pelajaran (setiap hari).”

Pembiasaan membaca buku ini dianggap dapat menumbuhkan minat baca serta meningkatkan keterampilan membaca agar pengetahuan dapat dikuasai secara lebih baik.

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dikembangkan dengan menyasar ekosistem sekolah di jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. GLS dilaksanakan dengan tiga tahapan, mulai dari penumbuhan minat baca melalui kegiatan 15 menit membaca buku non-pelajaran, meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan, hingga meningkatkan kemampuan literasi di semua mata pelajaran (Kemendikbud, 2016).

Gerakan Literasi Sekolah diharapkan mampu menggerakkan warga sekolah, pemangku kepentingan pendidikan dan masyarakat untuk ikut dalam upaya menumbuhkembangkan budaya literasi di sekolah, meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak, dan menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca (Kemendikbud, 2016:2). Diharapkan pula dengan adanya gerakan literasi ini maka generasi bangsa ini semakin sadar akan pentingnya budaya literasi di zaman yang semakin modern.

B. STRATEGI GERAKAN LITERASI SEKOLAH

Program GLS melibatkan partisipasi publik, seperti pegiat literasi, orang tua, tokoh masyarakat, dan profesional. Keberhasilan berliterasi di sekolah perlu diupayakan melalui kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan budaya literasi. Kegiatan-kegiatan tersebut mengacu pada lima aspek strategi yang sudah ditetapkan, yaitu (Kemendikbud, 2017:19):

1. Penguatan Kapasitas Fasilitator
 - a. Pelatihan guru dan tenaga kependidikan dalam menerapkan literasi pada pembelajaran
 - b. Pelatihan guru dan tenaga kependidikan dalam pembuatan mainan edukatif berbasis literasi; dan
 - c. Forum diskusi bagi warga sekolah untuk mengembangkan kegiatan literasi dan meningkatkan kemampuan berliterasi.

2. Peningkatan Jumlah dan Ragam Sumber Bacaan Bermutu
 - a. Penyediaan bahan bacaan nonpelajaran yang beragam
 - b. Penyediaan alat peraga dan mainan edukatif yang mendukung kegiatan literasi
 - c. Penyediaan bahan belajar literasi dalam bentuk digital
 - d. Program menulis buku bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan.

3. Perluasan Akses terhadap Sumber Belajar dan Cakupan Peserta Belajar
 - a. Pengembangan sarana penunjang yang membentuk ekosistem kaya literasi
 - b. Penyediaan laboratorium yang berkaitan dengan literasi, misalnya, laboratorium bahasa, sains, finansial, dan digital
 - c. Penyediaan pojok baca, baik di tiap kelas maupun di tempat-tempat strategis di sekolah
 - d. Pengoptimalan perpustakaan sekolah
 - e. Penyelenggaraan open house oleh sekolah yang sudah mengembangkan literasi
 - f. Program pengimbasan sekolah
 - g. Pelaksanaan kampanye literasi

4. Peningkatan Pelibatan Publik
 - a. Pelaksanaan sesi diskusi dengan tokoh atau pegiat berbagai bidang literasi mengenai pengalaman dan pengetahuan mereka terkait dengan bidang yang mereka kuasai

- b. Pelaksanaan festival atau bulan literasi yang melibatkan pakar, pegiat literasi, dan masyarakat umum
 - c. Pelibatan BUMN dan DUDI dalam pengadaan bahan bacaan dan kegiatan literasi di sekolah.
5. Penguatan Tata Kelola
- a. Pengalokasian waktu atau jadwal khusus untuk melakukan berbagai kegiatan literasi di sekolah
 - b. Pengalokasian anggaran untuk mendukung literasi di sekolah
 - c. Pembentukan tim literasi sekolah yang terdiri atas kepala sekolah, pengawas, guru, dan wakil orang tua peserta didik dengan tugas memantau berjalannya kegiatan-kegiatan literasi di sekolah
 - d. Pembuatan kebijakan yang mengatur kegiatan literasi di sekolah sehingga dapat memaksimalkan keterlibatan semua warga sekolah
 - e. Penguatan peran komite sekolah untuk membangun relasi kerja sama dan komitmen dalam melaksanakan kegiatan literasi.

C. TAHAPAN GERAKAN LITERASI SEKOLAH

Siswa Sekolah Dasar (SD) dituntut memiliki kemampuan membaca dalam hal memahami teks secara analitis, kritis, dan reflektif di era global ini. Sekolah berperan penting dalam memberikan keterampilan literasi informasi itu melalui tahapan dalam pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah. Berdasarkan Desain Induk GLS (2018), kegiatan GLS adalah sebagai berikut:

1. Pembiasaan

Pada fase pertama ada pembiasaan. Proses pembiasaan merupakan hal yang fundamental. Pembiasaan bertujuan untuk menumbuhkan minat terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membaca dalam diri warga sekolah. Penumbuhan minat baca merupakan hal fundamental bagi pengembangan kemampuan literasi peserta didik. Salah satu cara untuk menumbuhkan minat baca adalah membiasakan warga sekolah membaca buku selama 15 menit setiap hari. Kegiatan 15 menit membaca dapat dilaksanakan sebelum

pelajaran dimulai atau pada waktu lain yang memungkinkan. Kegiatan yang bertujuan menumbuhkan minat terhadap bacaan ini dilaksanakan tanpa tagihan sampai minat membaca warga sekolah tumbuh, berkembang, dan sampai pada tahap gemar/cinta membaca.

2. Pengembangan

Kegiatan literasi pada fase ini bertujuan mengembangkan kemampuan memahami bacaan dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan (Anderson & Krathwol, 2001). Pengembangan minat baca yang berdasarkan pada kegiatan membaca 15 menit setiap hari ini mengembangkan kecakapan literasi melalui kegiatan nonakademis (tagihan nonakademis yang tidak terkait dengan nilai dapat dilakukan). Contoh: menulis sinopsis, berdiskusi mengenai buku yang telah dibaca, kegiatan ekstrakurikuler, dan kunjungan wajib ke perpustakaan (jam literasi).

3. Tahap ke-3 (Pembelajaran)

Kegiatan literasi pada fase pembelajaran bertujuan mengembangkan kemampuan memahami teks dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi teks buku pengayaan dan buku pelajaran (cf. Anderson & Krathwol, 2001). Dalam hal ini tagihan yang bersifat akademis (terkait dengan mata pelajaran) dapat dilakukan. Guru menggunakan strategi literasi dalam melaksanakan pembelajaran (dalam semua mata pelajaran). Pelaksanaan strategi literasi didukung dengan penggunaan pengatur grafis. Selain itu, semua mata pelajaran sebaiknya menggunakan ragam teks (cetak/visual/digital) yang tersedia dalam buku-buku pengayaan atau informasi lain di luar buku pelajaran. Guru diharapkan bersikap kreatif dan proaktif mencari referensi pembelajaran yang relevan.

Pelaksanaan pembelajaran berbasis literasi ini mendukung pelaksanaan

Kurikulum 2013 yang mensyaratkan peserta didik membaca buku nonteks pelajaran yang dapat berupa buku tentang pengetahuan umum, kegemaran, minat khusus, atau teks multimodal, dan juga dapat dikaitkan dengan mata pelajaran tertentu sebanyak enam buku bagi siswa SD, 12 buku bagi siswa SMP, dan 18 buku bagi siswa SMA/SMK. Buku laporan kegiatan membaca ini disediakan oleh wali kelas. Judul dan jumlah buku yang telah dibaca dijadikan bahan pertimbangan pada saat kenaikan kelas atau kelulusan jenjang tertentu.

Setiap fase pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah akan berjalan dengan baik apabila mempunyai fokus – fokus kegiatan pada setiap tahapannya. Hal ini agar pelaksanaan dan pencapaian target dari Gerakan Literasi Sekolah menjadi jelas. Menurut Kemendikbud (2016:29) ada beberapa fokus kegiatan pada literasi sekolah yang dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Fokus Kegiatan dalam Tahapan Literasi Sekolah

Tahapan	Kegiatan
Pembiasaan (belum ada tagihan)	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="471 802 957 943">1. Lima belas menit membaca setiap hari sebelum jam pelajaran melalui kegiatan membacakan buku dengan nyaring (<i>read aloud</i>) atau seluruh warga sekolah membaca dalam hati (<i>sustained silent reading</i>). <li data-bbox="471 967 957 1217">2. Membangun lingkungan fisik sekolah yang kaya literasi, antara lain: (1) menyediakan perpustakaan sekolah, sudut baca, dan area baca yang nyaman; (2) pengembangan sarana lain (UKS, kantin, kebun sekolah); dan (3) penyediaan koleksi teks cetak, visual, digital, maupun multimodal yang mudah diakses oleh seluruh warga sekolah; (4) pembuatan bahan kaya teks (<i>print-rich materials</i>)
Pengembangan (ada tagihan sederhana untuk penilaian non- akademik)	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="471 1233 957 1455">1. Lima belas menit membaca setiap hari sebelum jam pelajaran melalui kegiatan membacakan buku dengan nyaring, membaca dalam hati, membaca bersama, dan/atau membaca terpandu diikuti kegiatan lain dengan tagihan non-akademik, contoh: membuat peta cerita (<i>story map</i>), menggunakan pengaturan grafis, bincang buku.

Tahapan	Kegiatan
Pengembangan (ada tagihan sederhana untuk penilaian non- akademik)	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="482 225 972 683">2. Mengembangkan lingkungan fisik, sosial, afektif sekolah yang kaya literasi dan menciptakan ekosistem sekolah yang menghargai keterbukaan dan kegembiraan terhadap pengetahuan dengan berbagai kegiatan, antara lain: (a) memberikan penghargaan kepada capaian perilaku positif, kepedulian sosial, dan semangat belajar peserta didik; penghargaan ini dapat dilakukan pada setiap upacara bendera Hari Senin dan/ atau peringatan lain; (b) kegiatan-kegiatan akademik lain yang mendukung terciptanya budaya literasi di sekolah (belajar di kebun sekolah, belajar di lingkungan luar sekolah, wisata perpustakaan kota/daerah dan taman bacaan masyarakat, dll.) <li data-bbox="482 708 972 1074">3. Pengembangan kemampuan literasi melalui kegiatan di perpustakaan sekolah atau taman bacaan atau sudut baca kelas dengan berbagai kegiatan, antara lain: (a) membacakan buku dengan nyaring, membaca dalam hati membaca bersama (<i>shared reading</i>), membaca terpandu (<i>guided reading</i>), menonton film pendek, dan/atau membaca teks visual/ digital (materi dari internet); (b) peserta didik merespon teks (cetak/visual/digital), fiksi dan nonfiksi, melalui beberapa kegiatan sederhana seperti menggambar, membuat peta konsep, berdiskusi, dan berbincang tentang buku
Pembelajaran (ada tagihan akademik)	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="482 1094 972 1233">1. jam pelajaran melalui kegiatan membacakan buku dengan nyaring, membaca dalam hati, membaca bersama, dan/atau membaca terpandu diikuti kegiatan lain dengan tagihan non-akademik dan akademik. <li data-bbox="482 1259 972 1337">2. Kegiatan literasi dalam pembelajaran, disesuaikan dengan tagihan akademik di kurikulum 2013.

Tahapan	Kegiatan
Pembelajaran (ada tagihan akademik)	3. Lima belas menit membaca setiap hari sebelum Melaksanakan berbagai strategi untuk memahami teks dalam semua mata pelajaran (misalnya, dengan menggunakan pengaturan grafis). 4. Menggunakan lingkungan fisik, sosial afektif, dan akademik disertai beragam bacaan (cetak, visual, auditori, digital) yang kaya literasi di luar buku teks pelajaran untuk memperkaya pengetahuan dalam mata pelajaran

D. FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEBERHASILAN GERAKAN LITERASI SEKOLAH

Berdasarkan Kemendikbud (2017:35), aspek yang diukur dalam penilaian keberhasilan Gerakan Literasi Sekolah adalah sebagai berikut :

1. *Input*

Ketersediaan sumber daya pendukung kegiatan literasi, baik di dalam maupun luar sekolah yang meliputi lingkungan fisik dan sosial sekolah, sarana prasarana, tenaga pendidik, dana, dan sistem/ tata kelola GLS

2. *Proses*

Kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan kemampuan literasi yang dilaksanakan di dalam kelas, di luar kelas (budaya/pembiasaan), dan pemanfaatan sumber-sumber belajar di masyarakat. Kegiatan mencakup intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

3. *Output*

Capaian literasi siswa dalam bentuk skor capaian, hasil karya siswa, prestasi siswa dalam berbagai lomba, dan lain-lain.

Menurut Fanani (2017), faktor-faktor yang diukur dalam penilaian implementasi Gerakan Literasi Sekolah adalah sebagai berikut:

1. Faktor internal

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan gerakan literasi sekolah yang berasal dari dalam sekolah, yaitu:

a. Peserta didik

Menurut Tirtarahardja dan La Sulo (2010:52), peserta didik berstatus sebagai subjek didik karena ia pribadi yang otonom, yang ingin diakui keberadaannya, yang ingin mengembangkan diri secara terus menerus guna memecahkan masalah – masalah dalam kehidupannya.

b. Sarana Prasarana

Menurut PP No.19 Tahun 2005, pasal 1 ayat (8), “Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi”. Dalam hal ini, sarana yang paling utama untuk menunjang keberhasilan gerakan literasi sekolah adalah buku. Sebab, salah satu strategi untuk menciptakan lingkungan literasi, perlu adanya penempatan buku di sudut – sudut sekolah.

c. Ketersediaan dana

Dana yang cukup dapat memenuhi kebutuhan – kebutuhan yang diperlukan sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didiknya khususnya dalam menunjang pelaksanaan gerakan literasi sekolah.

d. Pemahaman tenaga pendidik dan kependidikan terhadap gerakan literasi sekolah.

Kebijakan – kebijakan baru tentu perlu adanya sosialisasi yang matang dan merata. Apabila kebijakan diterapkan tetapi sosialisasi hanya sebatas formalitas, maka hasilnya pada pelaksanaannya tidak akan optimal. Apabila tenaga pendidik memahami filosofinya, tentu akan sangat menunjang pelaksanaan gerakan literasi sekolah sehingga

dapat menciptakan generasi yang memiliki budaya literasi tinggi dan berakhlak baik.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan gerakan literasi sekolah yang berasal dari luar sekolah, yaitu:

a. Daya dukung masyarakat

Gerakan literasi sekolah merupakan gerakan sosial yang dilaksanakan untuk menciptakan generasi yang berbudi pekerti melalui budaya literasi. Artinya setiap elemen dari pemerintah hingga masyarakat mempunyai peran dalam mensukseskan gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah yang telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti tidak hanya dibebankan kepada pihak – pihak yang berada di sekolah tetapi masyarakat juga harus ikut berperan.

b. Daya Dukung Keluarga

Meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya upaya terpadu dalam mengembangkan pembiasaan literasi putra/putri mereka; menularkan praktik program literasi di sekolah dan memastikan keberlangsungan dan konsistensi antara kegiatan literasi di sekolah dan di rumah; menciptakan sebanyak mungkin model teladan literasi, yang terdiri dari guru, orang tua, anggota keluarga dan orang dewasa lain dalam kehidupan peserta didik yang gemar membaca; membantu pelaksanaan program literasi di sekolah; Membuat peserta didik nyaman belajar di sekolah karena terjalin komunikasi dan hubungan baik antara orang tua dan sekolah; contoh program pelibatan partisipasi orang tua dalam program gerakan literasi; seminar, bincang-bincang/talk show tentang pembimbingan remaja bersiap menjadi dewasa, pembimbingan peserta didik menyiapkan dunia perkuliahan, dsb; melibatkan peran orang tua dalam mengembangkan sudut buku, area baca, dan perpustakaan, misalnya melalui: a. Menyumbang buku baru/bekas, majalah bekas, materi kaya teks, dan

- bahan kaya cetak lain untuk sudut buku kelas dan perpustakaan. b. Bekerjasama dengan guru untuk membimbing peserta didik melakukan kegiatan literasi di rumah. c. Orang tua menjadi relawan untuk memilih buku yang tepat bagi usia remaja. (Kemendikbud, 2016:26)
- c. Daya Dukung Pemerintah

Dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan, peran pemerintah sangat besar agar kebijakan tersebut dapat terlaksana. Seperti halnya gerakan literasi sekolah ini, peran pemerintah sangat vital. Mulai dari sosialisasi, pemenuhan sarana prasarana, monitoring hingga evaluasi. Apabila pemerintah dapat memainkan perannya dengan maksimal, bukan tidak mungkin jika generasi bangsa ke depannya menjadi generasi yang mempunyai tingkat literasi yang tinggi.

Berdasarkan faktor-faktor diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan gerakan literasi sekolah adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari peserta didik, tenaga pendidik, sarana prasarana, dana, tata kelola, proses. Faktor eksternal terdiri dari dukungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

BAB IV

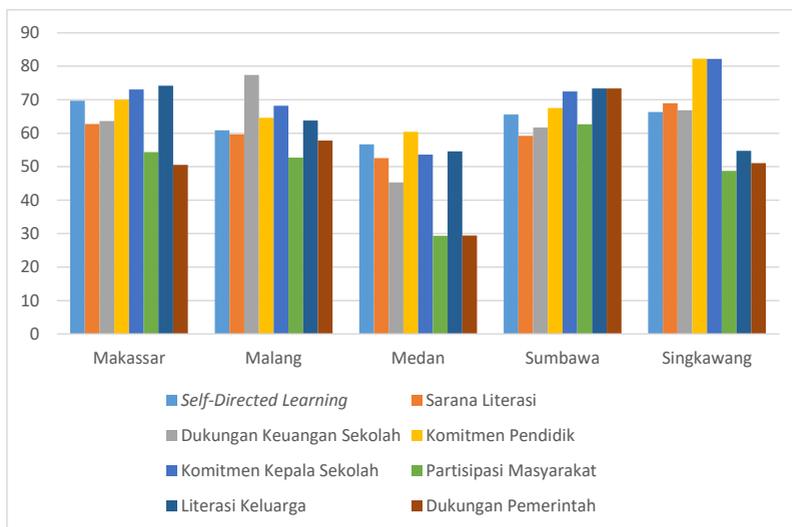
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI GERAKAN LITERASI SEKOLAH

A. GAMBARAN FAKTOR DETERMINAN GLS DI INDONESIA

Pada implementasi Gerakan Literasi Sekolah terdapat 8 faktor yang menjadi penentu GLS, yaitu variabel: *self directed learning*, sarana literasi, dukungan keuangan sekolah, komitmen pendidik, peran kepala sekolah, partisipasi masyarakat, literasi keluarga, dukungan pemerintah (Adakah referensi GLS yang menyebutkan 8 faktor ini? (dijelaskan pada setiap point pembahasan setiap variabel)). Dari beberapa variabel yang menjadi fokus dalam buku, secara umum dapat dilihat rerata variabel per wilayah pada Gambar 1.

1. *Self-directed learning*

Self directed learning adalah peningkatan pengetahuan, keahlian, prestasi, dan mengembangkan diri dimana individu menggunakan banyak metode dalam banyak situasi dalam setiap waktu (Gibbons, 2003). Knowles (1975) berpendapat bahwa *self directed learning* merupakan sebuah proses dimana sebuah dimana individu mengambil inisiatif, dengan atau tanpa bantuan orang lain, dan proses dalam *self-directed learning* ini dilakukan dengan menyadari kebutuhan sendiri dalam belajar, mengatur tujuan pribadi, membuat keputusan pada sumber dan strategi belajar dan menilai hasil.



Gambar 1. Rerata Variabel per Wilayah

Self-directed learning merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan gerakan literasi sekolah, diketahui *self-directed learning* siswa berada dalam kategori sedang dengan rerata sebesar 63,72 artinya *self directing learning* siswa termasuk biasa saja. *Self-directed learning* memiliki nilai minimal sebesar 41,67, nilai maksimal sebesar 87,50, standar deviasi sebesar 10,64, dan varians sebesar 113,18. Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa sekolah masih harus mencari strategi yang tepat untuk membiasakan siswa untuk membaca.

Kemampuan *self-directed learning* beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dari 15 sekolah yang disurvei dari 5 provinsi, diperoleh perbandingan rataan *Self-Directed Learning* terendah di kota berada di Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan nilai rataan 56,67. Sedangkan rataan *Self-Directed Learning* tertinggi berada pada SD di Kota Makassar dengan nilai rataan 69,72. Salah satu SD di kota Makasar adalah SDN IKIP I Makassar (akreditasi A), telah menerapkan Kurikulum 13 dan mengikuti Gerakan Literasi Sekolah (GLS) selama beberapa tahun terakhir.

Bahkan beberapa siswa telah memenangkan kejuaraan umum pada lomba-lomba literasi mulai dari mewakili sekolah sampai mewakili Provinsi Sulawesi Selatan.

Gerakan literasi terlihat dari pembiasaan yang dilakukan di sekolah SDN IKIP I Makassar dengan menerapkan kegiatan membaca selama 15 menit sebelum memulai pembelajaran, mendiskusikan cerita dan menceritakan kembali apa yang telah dibaca. Hal ini dapat meningkatkan *self directed learning* pada siswa. Selain itu, sekolah juga menyediakan sarana perpustakaan dengan beragam buku cerita, menciptakan lingkungan dengan banyak bacaan (di dinding kelas, luar kelas, tulisan gantung, dll.). Salah satu siswa di SDN IKIP I Makassar juga pernah menyusun cerita dan dibukukan dibantu dengan guru yang juga pustakawan di sekolah tersebut.

Dalam mengoptimalkan Gerakan Literasi Sekolah, guru dan kepala sekolah SDN IKIP I Makassar menciptakan ruang kelas yang menarik dengan menuliskan dan menggambar ruang kelas dengan macam-macam bentuk dengan tulisan yang berhubungan dengan materi pelajaran yang sesuai dengan jenjang mereka masing-masing. Sementara berbeda dengan SD 173102 di Kab. Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dengan akreditasi yang sama yakni A dan menerapkan pembelajaran K-13. Implementasi GLS di SDN 173102 Tarutung masih dalam tahap pembiasaan.

Diakui oleh guru kelas 4, 5 dan 6, salah satu upaya kegiatan di dalam gerakan literasi tersebut adalah 15 menit membaca buku sebelum waktu belajar dimulai. Namun ketika ditanyakan buku apa saja yang dibaca, guru masih menyuruh siswa membaca buku pelajaran bukan non pelajaran. Seharusnya dalam menumbuhkan minat baca peserta didik untuk meningkatkan keterampilan membaca dan pengetahuan siswa dibebaskan membaca buku nonpelajaran pula. Sekolah juga belum memiliki tenaga khusus pustakawan, bahkan tidak ada buku catatan peminjaman atau buku kunjungan. Seperti pengakuan Kepala Sekolah, sekolah lebih mengarahkan siswa untuk berkunjung ke perpustakaan hanya pada jam pelajaran pulang sekolah atau kunjungan ke perpustakaan milik warga masyarakat yang

berjarak 100meter dari sekolah, padahal hal demikian membuat siswa menjadi malas mendatangi perpustakaan terlebih jika diarahkan waktunya pada jam pulang sekolah yang seharusnya siswa sudah lelah ingin pulang ke rumah. Tidak tersedianya perpustakaan sekolah, kurangnya pemahaman kepesek terhadap literasi sekolah, menjadi kendala literasi kurang berjalan maksimal di SDN 173102 Tarutung, juga diakui keterbatasan buku bacaan, kurangnya dukungan dari para orangtua siswa diakui juga sebagai kendala rendahnya literasi di SDN 173102 Tarutung. Keterbatasan dana juga sebagai masalah umum karena tanpa ada penjelasan sekolah tidak melakukan pengadaan buku dari dana BOS.

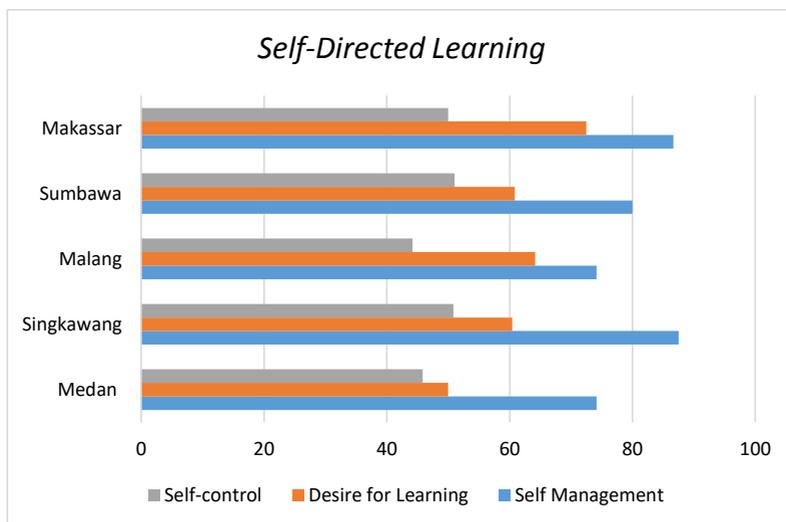
Upaya yang dilakukan guru dalam mengoptimalkan literasi sekolah adalah sebatas mengarahkan siswa berkunjung ke ruang baca di ruang guru sepulang sekolah, padahal diakui kepala sekolah jarang siswa mau berkunjung kesana karena sungkan ruang baca yang sempit. Guru dan Kepala Sekolah cenderung menyuruh siswa berkunjung ke perpustakaan Amanda milik pegiat literasi di daerah yang berjarak 100meter dari sekolah. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) cukup membantu sekolah dalam keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. Kolaborasi yang dilakukan sekolah dan TBM adalah dengan meminta siswa berkunjung ke TBM, khususnya pada akhir pekan. Namun kolaborasi antara sekolah dan TBM masih kurang maksimal. Sementara keberadaan TBM cukup membantu karena keterbatasan sarana dan prasarana sekolah. Kendala kepala sekolah dalam GLS adalah tidak adanya sarana perpustakaan, terbatasnya guru dan bahan bacaan. Solusi yang dilakukan oleh sekolah dalam menyelesaikan kendala implementasi GLS adalah memaksimalkan guru dan sarana yang ada, itu pun cukup sulit karena guru yang ada pun pemahaman literasi dan perpustakaan sangat terbatas. Idealnya, sarana literasi mencakup perpustakaan sekolah, sudut baca kelas, dan area baca. Perpustakaan berfungsi sebagai pusat pembelajaran di SD, sebagai pusat pengelolaan pengetahuan dan sumber belajar di SD yang dikelola oleh kepala SD. Karena perpustakaan yang dikelola dengan baik diharapkan akan

mampu meningkatkan minat baca warga SD dan menjadikan mereka pembelajar sepanjang hayat. Perpustakaan SD idealnya berperan dalam mengkoordinasi pengelolaan sudut baca kelas, area baca, dan prasarana literasi lain di SD.

GLS adalah sebagai upaya menyeluruh yang melibatkan semua warga sekolah (guru, peserta didik, orang tua/wali murid) dan masyarakat, sebagai bagian dari ekosistem pendidikan. Oleh karena itu, perlu upaya lebih maksimal bagi kepala sekolah dan guru di SDN 173102 Tarutung. Saran dan upaya dalam pengembangan GLS di SDN 173102 Tarutung, adalah sekolah harus berinisiasi melibatkan partisipasi komite sekolah, orang tua, alumni, dan dunia bisnis dan industri (jika ada) dapat membantu memelihara dan mengembangkan sarana sekolah agar capaian literasi peserta didik dapat terus ditingkatkan. Dengan keterlibatan semakin banyak pihak, peserta didik dapat belajar dari figur teladan literasi yang beragam.

Peran kepala sekolah sangat diperlukan dalam kolaborasi dengan berbagai pihak, keaktifan kepala sekolah menjalin kerjasama dengan publik mutlak diperlukan dalam menyukseskan Gerakan Literasi Sekolah. Sekolah dapat memulai dengan kalangan terdekat yang memiliki hubungan emosional dengan sekolah, misalnya komite sekolah, orang tua, dan alumni; melibatkan komunitas tersebut dalam perencanaan awal program dan membangun partisipasi dan rasa memiliki terhadap program; melibatkan komite sekolah, orang tua, dan alumni sebagai relawan membaca 15 menit sebelum pelajaran; membuat kegiatan-kegiatan untuk menyambut kedatangan alumni ke sekolah; apabila kegiatan telah berjalan, sekolah perlu menyampaikan apresiasi dengan mencantumkan nama donatur (misalnya, dalam properti prasarana seperti perabotan, buku, dan lain-lain atau buletin atau majalah dinding sekolah) atau mengundang mereka dalam kegiatan dan seremoni sekolah; serta menjaga hubungan baik dengan alumni.

Self-directed learning diukur dengan diukur dengan tiga dimensi, yakni self control, desire for learning dan self management. Rerata dimensi dari *self-directed learning* dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Rerata Dimensi *Self-Directed Learning* per Wilayah

Bila dilihat perbandingan dimensi *Self-control* antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, diketahui sekolah dengan siswa yang menunjukkan kemampuan *self-directed learning* paling tinggi yaitu siswa SD di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dengan rerata sebesar 51.04 (kategori sedang). Adapun sekolah dengan kemampuan *self-directed learning* paling rendah yaitu siswa SD di Malang Provinsi Jawa Timur dengan rerata sebesar 44.17 (kategori rendah).

Bila dilihat perbandingan dimensi *Desire for Learning* antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, diketahui sekolah dengan siswa yang menunjukkan kemampuan *self-directed learning* paling tinggi yaitu siswa SD di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan rerata sebesar 72.5 (kategori tinggi). Adapun sekolah dengan kemampuan *self-directed learning* paling rendah yaitu siswa SD di Kab. Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dengan rerata sebesar 50 (kategori rendah).

Bila dilihat perbandingan dimensi *Self-management* antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, diketahui sekolah dengan siswa yang menunjukkan

kemampuan *self-directed learning* paling tinggi yaitu siswa di SD Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dengan rerata sebesar 87.5 (kategori tinggi). Adapun sekolah dengan kemampuan *self-directed learning* paling rendah yaitu siswa SD di Tapanuli Utara, Sumatera Utara dan Malang Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Timur dengan rerata masing-masing sebesar 74.17 (kategori rendah).

Untuk dapat meningkatkan dimensi-dimensi dalam variabel *self-directed learning* seperti belajar mandiri, hasrat untuk belajar, dan pengendalian diri, peran guru sangat diperlukan dalam mendorong siswa untuk aktif membaca. Menurut Shiong et al., (2009), peran dan kemampuan pedagogis guru sangat dibutuhkan untuk meningkatkan *self-directed learning* pada siswa. Guru juga perlu memilih metode dan strategi pembelajaran yang tepat digunakan untuk meningkatkan *self-directed learning*, dan secara rutin mengevaluasi peningkatan *self-directed learning* pada siswa.

Secara umum jika dilihat dari informasi terkait tahapan Gerakan Literasi Sekolah dari kepala sekolah, terlihat adanya ketidak sesuaian antara Self Directed Learning pada diri siswa dimana keinginan untuk memotivasi diri untuk membaca masih biasa saja tetapi tahapan GLS di sekolah sudah pada tahap pembelajaran (Lampiran 6). Hal ini terjadi karena pemahaman Kepala Sekolah dan guru tentang tahapan GLS dan implementasinya masih kurang. Kepala sekolah dan guru masih bingung menerapkan kepada siswa, sehingga implementasi program masih sebatas pada penyediaan perpustakaan dan pelaksanaan membaca bersama sebelum pelajaran dimulai.

2. Sarana Literasi Sekolah

Sarana merupakan aspek penting dalam pendidikan, kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh sarana dalam sekolah. Menurut PP No.19 Tahun 2005, pasal 1 ayat (8), "Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan,

laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi”.

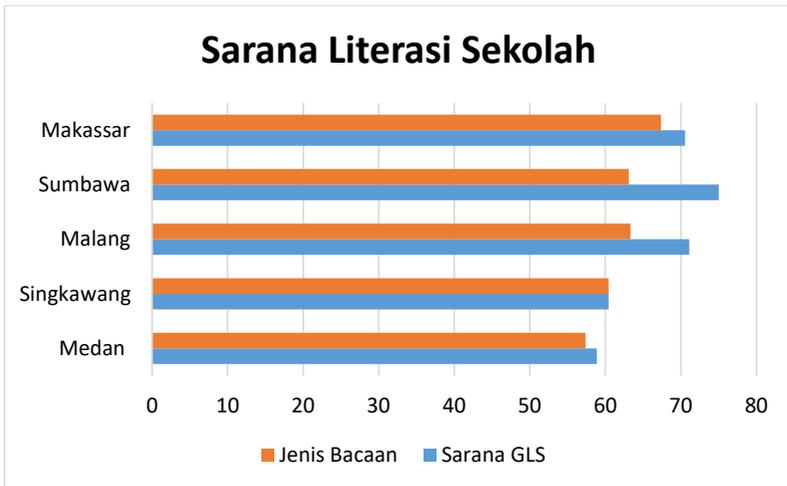
Sarana Literasi Sekolah merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Sarana Literasi Sekolah berada dalam kategori sedang dengan rerata sebesar 60.16. Sarana Literasi Sekolah memiliki nilai maksimal sebesar 100, nilai minimal sebesar 25, standar deviasi sebesar 12.51, dan varians sebesar 156.44.

Sarana Literasi Sekolah yang dimiliki beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dari 15 sekolah yang disurvei dari 5 provinsi, diperoleh perbandingan rerata variabel sarana literasi terendah berada di Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Hal ini terkonfirmasi dengan wawancara kepala sekolah SDN 173104 Tarutung, dimana perpustakaan berada satu ruangan dengan ruang kepala sekolah, ruang guru dan ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Sekolah lain di Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara mengakui belum maksimal dalam menerapkan literasi sekolah. Tidak adanya ruang perpustakaan diakui oleh kepala sekolah menjadi kendala. Ada pun ruang perpustakaan atau ruang baca yang dimiliki SDN 173102 masih menyatu dengan ruang kepek dan ruang guru.

Ketika dilakukan observasi ke lokasi/sekolah hanya memiliki sedikit poster-poster atau kampanye membaca di kelas, koridor, dan area lain di sekolah. Padahal hal ini menjadi bagian dari indikator pembiasaan dalam literasi di sekolah khususnya SD. Sementara sarana literasi tertinggi berada di wilayah Singkawang, yakni SDN 51 Singkawang Selatan. Kepala sekolah menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang diberikan oleh pemerintah untuk mengelola perpustakaan, pojok baca dan zona baca lainnya. SDN 51 Singkawang Selatan memiliki ruang khusus tersendiri untuk membaca berupa sebuah ruang perpustakaan. Selain kemampuan guru dalam menyelenggarakan kegiatan literasi, dukungan dari sarana pembelajaran sangat penting dalam membantu guru. Semakin lengkap dan memadai sarana pembelajaran yang dimiliki sebuah sekolah akan

memudahkan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidikan. Khususnya sarana perpustakaan yang baik dan ketersediaan buku dalam perpustakaan. Untuk dapat meningkatkan indikator dalam variabel sarana literasi sekolah ada beberapa hal yang dapat dilakukan di antaranya, bantuan dari pemerintah baik daerah dan pusat dalam peningkatan jumlah bahan bacaan dan perbaikan perpustakaan.

Sarana literasi terdiri dari dua dimensi, yakni sarana GLS dan jenis bacaan yang disediakan sekolah dalam rangka mendukung GLS. Dari kedua dimensi tersebut, dimensi Sarana GLS merupakan yang tertinggi dengan skor rata-rata sebesar 63.84 (kategori sedang). Adapun dimensi yang paling lemah adalah Jenis Bacaan dengan skor rata-rata sebesar 60.07 (kategori sedang).



Gambar 3. Rerata Dimensi Sarana Literasi Sekolah per Wilayah

Bila dilihat perbandingan dimensi Sarana GLS antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, diketahui sekolah dengan siswa yang menunjukkan kemampuan Sarana Literasi Sekolah paling tinggi yaitu siswa SD di Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan rerata sebesar 75 (kategori tinggi). Adapun sekolah dengan kemampuan Sarana Literasi Sekolah paling

rendah yaitu siswa SD di Kab. Tapanuli Utara dengan rerata masing-masing sebesar 58.89 (kategori sedang).

Bila dilihat perbandingan dimensi Jenis Bacaan antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, diketahui sekolah dengan siswa yang menunjukkan kemampuan Sarana Literasi Sekolah paling tinggi yaitu siswa SD di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan rerata sebesar 67.38 (kategori sedang). Adapun sekolah dengan kemampuan Jenis Bacaan paling rendah yaitu siswa SD di Kab. Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dengan rerata sebesar 57.38 (kategori sedang).

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah proses pengadaan dan pendayagunaan komponen-komponen yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien (Indrawan, 2015). Sarana literasi merupakan alat/ instrumen langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya; ruang, buku, dan perpustakaan. Oleh karena itu dalam peningkatan implementasi GLS sarana literasi seperti, sudut buku kelas, perpustakaan dan area baca perlu menjadi perhatian sekolah, selain itu jenis bacaan yang beragam seperti buku cerita bergambar, buku tanpa teks, buku teks sederhana, buku fiksi, buku nonfiksi, buku bergambar kaya akan teks dan buku novel pemula harus sekolah sediakan dalam rangka mengimplementasikan GLS.

GLS yang merupakan suatu gerakan untuk menumbuhkan karakter anak bangsa dengan cara pembiasaan membaca, sebaiknya juga didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Pada umumnya kemampuan sekolah dalam penyediaan sarana dan prasarana masih kategori minimal. Hal ini menuntut kreativitas kepala sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan. Selain dana BOS yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pengadaan buku, kepala sekolah dapat bekerjasama dengan perpustakaan di seluruh Indonesia untuk membantu pengadaan buku karena pada masa tertentu perpustakaan akan mengeluarkan buku koleksinya untuk diputihkan sehingga dapat dimanfaatkan oleh sekolah-

sekolah yang membutuhkan. Berdasarkan pengamatan di lapangan terdapat sekolah yang kesulitan dalam peremajaan buku-buku di perpustakaan sekolah. Sekolah, dalam hal ini kepala sekolah harus aktif dalam meningkatkan sarana prasarana yang mendukung Gerakan Literasi Sekolah melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Kepala sekolah dan para guru mencari bantuan yang mendukung suksesnya Gerakan Literasi Sekolah, seperti program Perum Pos Indonesia yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pembebasan biaya bagi yang akan mengirimkan buku ke seluruh Indonesia setiap tanggal 17.

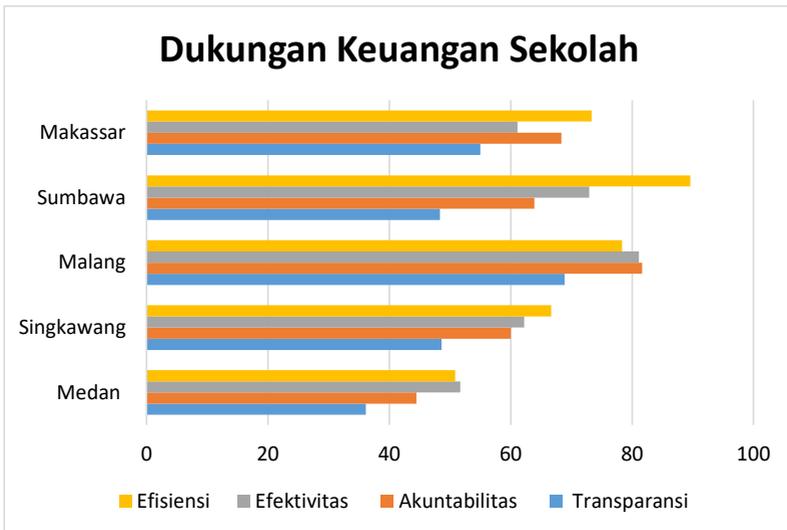
3. Dukungan Keuangan Sekolah untuk GLS

Keuangan merupakan salah satu elemen penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sebagaimana dikemukakan Anthony (1988), *“The person which is responsible for designing and operating the management control system as the controller. Actually, in many organization, the title of this is chief financial office”*. Oleh karena itu manajemen keuangan yang baik merupakan salah satu kunci dari keberhasilan sebuah lembaga pendidikan memajukan dan meningkatkan kualitasnya. Pendidikan tidak akan berjalan tanpa dukungan keuangan yang memadai karena dibutuhkan biaya untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan yang berhubungan dengan kelangsungan proses pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan, komponen keuangan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama-sama komponen lain (Mulyasa, 2011).

Oleh karena itu, berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2019 Pemerintah memberikan dana bantuan yang disebut dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) guna sekolah dapat meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Komponen pembiayaan BOS reguler pada SD salah satunya diperuntukkan

untuk menunjang program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) melalui pengembangan perpustakaan seperti penyediaan buku, langganan majalah dan publikasi, pemeliharaan perpustakaan, peningkatan kompetensi pustakawan, dan pengembangan pangkalan data perpustakaan. Dana BOS dapat digunakan 20% untuk pembelian buku teks dan buku non teks.

Dukungan Keuangan Sekolah untuk GLS merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Dukungan Keuangan Sekolah untuk GLS berada dalam kategori sedang dengan rerata sebesar 62.82. Dukungan Keuangan Sekolah untuk GLS memiliki nilai maksimal sebesar 100, nilai minimal sebesar 0, standar deviasi sebesar 27.76, dan varians sebesar 770.62.



Gambar 4. Rerata Dimensi pada Variabel Dukungan Keuangan Sekolah per Wilayah

Dukungan keuangan sekolah beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dari 15 sekolah yang disurvei dari 5 provinsi, diperoleh perbandingan Rerata Dukungan Keuangan Sekolah paling tinggi berada di kota Malang Provinsi Jawa Timur dengan rerata sebesar 77,42, indeks (kategori tinggi). Adapun sekolah dengan dukungan keuangan sekolah

paling rendah yaitu siswa di SDN Kab. Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dengan rerata sebesar 45,3 (kategori rendah).

Berdasarkan Peraturan menteri nasional no. 69 tahun 2009 ayat 2 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah harus transparan, efektif, efisien, dan akuntabilitas. Oleh karena itu dalam variabel dukungan keuangan sekolah terdapat empat dimensi, yaitu: (1) transparansi; (2) akuntabilitas; (3) efektivitas; (4) Efisiensi.

Bila dilihat perbandingan dimensi transparansi antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, diketahui sekolah dengan siswa yang menunjukkan dukungan keuangan sekolah paling tinggi yaitu siswa di SD Malang Provinsi Jawa Timur dengan rerata sebesar 68,8 (kategori sedang). Adapun sekolah dengan kemampuan Dukungan Keuangan Sekolah paling rendah yaitu siswa SD di Kab. Tapanuli Utara dan Malang 36,11 (kategori rendah).

Bila dilihat perbandingan dimensi akuntabilitas antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, diketahui sekolah dengan siswa yang menunjukkan kemampuan Dukungan Keuangan Sekolah paling tinggi yaitu siswa SD di Malang Provinsi Jawa Timur dengan rerata sebesar 81,66 (kategori tinggi). Adapun sekolah dengan dukungan keuangan sekolah paling rendah, indikator akuntabilitas yaitu siswa SD di Kab. Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dengan rerata sebesar 44,44 (kategori rendah).

Bila dilihat perbandingan dimensi efektivitas antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, diketahui sekolah dengan siswa yang menunjukkan dukungan keuangan sekolah paling tinggi yaitu siswa SD di Malang, Jawa Timur dengan rerata sebesar 81,11 (kategori tinggi). Adapun sekolah dengan dukungan keuangan sekolah paling rendah yaitu siswa SD di Kab. Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dengan rerata sebesar 51,66 (kategori sedang).

Bila dilihat perbandingan dimensi efisiensi antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, diketahui sekolah dengan siswa yang menunjukkan dukungan keuangan sekolah paling tinggi yaitu siswa SD di Sumbawa, Nusa Tenggara barat dengan rerata sebesar 89,58 (kategori sangat tinggi). Adapun sekolah dengan dukungan keuangan sekolah paling rendah yaitu siswa SD

di Kab. Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dengan rerata sebesar 50,83 (kategori sedang).

Berdasarkan hasil perbandingan rerata dimensi pada variabel dukungan keuangan sekolah per wilayah diketahui bahwa SD di Kab. Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara memiliki transparansi, efektif, efisien, dan akuntabilitas yang paling rendah dalam Implementasi GLS. Untuk dapat meningkatkan seluruh dimensi dalam variabel Dukungan Keuangan sekolah harus dapat mengelola lalu lintas uang yang diterima dan dibelanjakan mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan penyampaian umpan balik. Pengelolaan dana dimulai dengan perencanaan anggaran (budgeting). Perencanaan anggaran merupakan kegiatan penyusunan anggaran dengan cara menjabarkan suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan (Fattah, 2004). Membuat strategi pengelolaan keuangan yang dapat mengamankan pemasukan dan mengeluarkan dana untuk membiayai program secara efektif, efisien serta menghasilkan akuntabilitas keuangan yang berkualitas.

Sedangkan rerata dimensi transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas tertinggi terdapat di Kota Malang. Hal ini menunjukkan sekolah di kota Malang sudah memiliki pengelolaan yang baik dan menggunakan dana BOS dengan semestinya secara transparan, akuntabel dan efektif.

Untuk meningkatkan implementasi GLS melalui intervensi Dukungan Keuangan Sekolah, komponen keuangan yang dimiliki sekolah perlu dikelola dengan sebaik-baiknya agar dana dapat dimanfaatkan secara optimal untuk dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Pengelolaan tersebut membutuhkan manajemen yang baik dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Proses pengelolaan keuangan sekolah meliputi (Tampolon, 2015) (1) perencanaan anggaran, (2) strategi mencari sumber dana sekolah, (3) penggunaan keuangan sekolah, (4) pengawasan dan evaluasi anggaran, (5) pertanggungjawaban. Selain itu sekolah juga harus mengikuti Permendikbud no. 26 tahun 2017, yang memuat petunjuk teknis dalam

penggunaan dan pengelolaan dana BOS. Dalam petunjuk teknik tertera bagaimana regulasi yang harus ditaati oleh pengguna dan dana BOS dan semua teknis dalam pengelolaan dana BOS.

Berdasarkan observasi data, sebagian besar sekolah belum menggunakan dana BOS secara maksimal untuk pengadaan buku sebesar 20%, karena sebagian besar dana BOS masih dipergunakan untuk operasional sekolah.

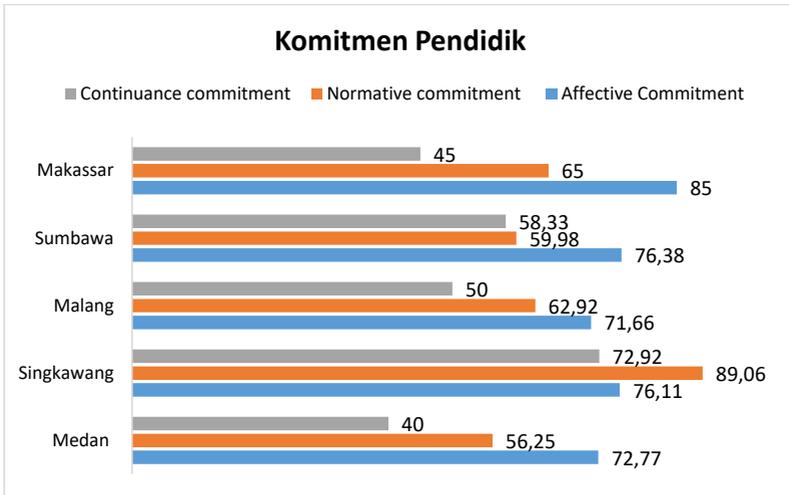
4. Komitmen Pendidik dalam Implementasi GLS

Pendidik dalam pelaksanaan pendidikan formal di sekolah adalah guru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah". Kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pihak sekolah menaruh harapan besar terhadap peran guru dalam pelaksanaan implementasi GLS. Guru memiliki peranan dalam kegiatan literasi dengan tujuan untuk membiasakan peserta didik untuk membaca, melalui proses membaca tersebut diharapkan dapat menumbuhkan karakter gemar membaca. Hasil pemahaman yang peserta didik dari membaca dapat lebih diarahkan guru melalui pembelajaran sehingga dapat membentuk perilaku kecakapan serta keterampilan berfikir kritis peserta didik. Guru diharapkan mampu menjadi motor penggerak pelaksanaan literasi di sekolah.

Komitmen Pendidik dalam Implementasi GLS merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Komitmen Pendidik dalam Implementasi GLS berada dalam kategori sedang dengan rerata

sebesar 62,82. Komitmen Pendidik dalam Implementasi GLS memiliki nilai sebesar 100, nilai minimal sebesar 0, standar deviasi sebesar 14,71, dan varians sebesar 216,37.

Komitmen Pendidik sekolah beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dari 15 sekolah yang disurvei dari 5 provinsi, diperoleh perbandingan rerata variabel Komitmen pendidik paling tinggi yaitu SDN di Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dengan rerata sebesar 82,30, indeks (kategori tinggi). Adapun sekolah dengan Komitmen Pendidik paling rendah yaitu di SDN Kab. Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dengan rerata sebesar 60,42 (kategori sedang).



Gambar 5. Rerata Dimensi pada Variabel Komitmen Pendidik per Wilayah

Meyer dan Allen (1991) merumuskan tiga dimensi komitmen dalam organisasi, yaitu: *affective commitment*, *continuance commitment*, dan *normative commitment*. *Affective commitment* berkaitan dengan hubungan emosional guru terhadap sekolahnya, identifikasi dengan sekolah, dan keterlibatan guru dengan kegiatan di sekolah. *Continuance commitment* meliputi komitmen yang di dasarkan pada penghargaan yang diharapkan guru untuk

dapat tetap berada dalam organisasi. *Normative commitment* meliputi perasaan guru terhadap kewajiban untuk tetap tinggal dalam organisasi. Oleh karena itu dalam variabel Komitmen Pendidik terdapat tiga dimensi, yaitu: (1) *Affective Commitment*; (2) *Normative commitment*; (3) *Continuance commitment*.

Bila dilihat perbandingan dimensi *affective commitment* antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, diketahui sekolah dengan siswa yang menunjukkan komitmen pendidik paling tinggi yaitu siswa di SD Makasar Provinsi Sulawesi Selatan dengan rerata sebesar 85 (kategori tinggi). Adapun sekolah dengan komitmen pendidik paling rendah yaitu siswa SD di Malang Provinsi Jawa Timur 71,66 (kategori sedang).

Bila dilihat perbandingan dimensi *Normative commitment* antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, diketahui sekolah dengan siswa yang menunjukkan komitmen pendidik paling tinggi yaitu siswa SD di Singkawang, Kalimantan Barat dengan rerata sebesar 89,06 (kategori tinggi). Adapun sekolah dengan komitmen pendidik paling rendah, indikator *Normative commitment* yaitu siswa SD di Kab. Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dengan rerata sebesar 56,25 (kategori sedang).

Bila dilihat perbandingan dimensi *Continuance commitment* antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, diketahui sekolah dengan siswa yang menunjukkan komitmen pendidik paling tinggi yaitu siswa SD di Singkawang, Kalimantan Barat dengan rerata sebesar 72,93 (kategori sedang). Adapun sekolah dengan komitmen pendidik paling rendah yaitu siswa SD di Kab. Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dengan rerata sebesar 40 (kategori rendah).

Dimensi *Continuance commitment* memiliki skor rata-rata yang paling kecil dibandingkan kedua indikator lainnya. Menurut Mayer dan Allen (1991), Komitmen berkelanjutan (*continuance commitment*) meliputi komitmen yang di dasarkan pada penghargaan yang diharapkan karyawan untuk dapat tetap berada dalam organisasi. Oleh karena itu untuk dapat meningkatkan dimensi *Continuance commitment* dalam variabel komitmen pendidik adalah perlu adanya *reward* yang diberikan kepada guru apabila

dapat menyukseskan gerakan implementasi sekolah, sehingga guru dapat lebih semangat, kreatif dan inovatif dalam menerapkan GLS.

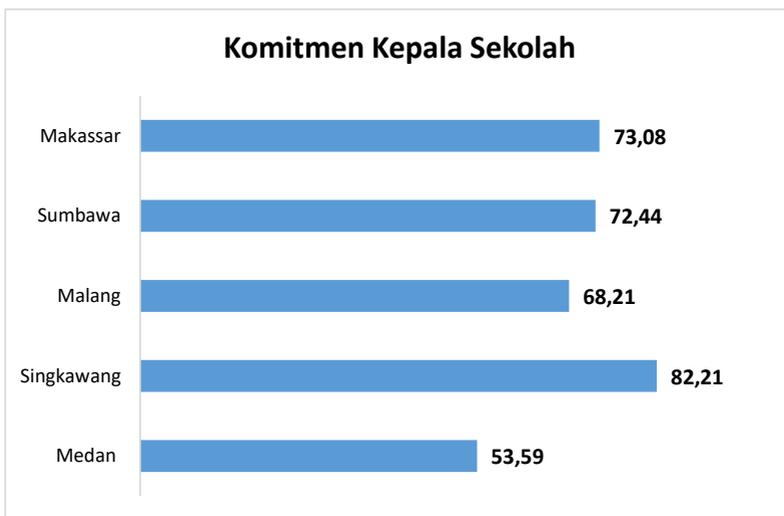
Dimensi Continuance commitment dan normative commitment wilayah yang memiliki nilai rata-rata skor terendah adalah Kab. Tapanuli Utara. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kepala sekolah dan guru di Kab. Tapanuli Utara kurang memiliki pemahaman yang cukup dalam implementasi GLS. Berdasarkan hasil wawancara di beberapa kota lain pun menunjukkan kurangnya kreatifitas dan inovasi guru dalam menerapkan GLS. Untuk meningkatkan implementasi GLS melalui intervensi komitmen pendidik ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Dessler (2005) mengungkapkan terdapat strategi dalam meningkatkan komitmen guru, yaitu : 1) berkomitmen pada nilai utama manusia, dengan membuat aturan tertulis, mempekerjakan guru dengan baik dan tepat, serta mempertahankan komunikasi yang baik dengan guru; 2) Memperjelas dan mengkomunikasikan misi organisasi, dengan memperjelas misi dan ideologi sekolah, menekankan orientasi berdasarkan nilai dan latihan, serta membentuk tradisi; 3) menjamin keadilan organisasi, dengan memiliki prosedur penyampaian keluhan yang komprehensif, dan menyediakan komunikasi dua arah yang ekstensif; 4) menciptakan rasa komunitas, dengan membangun homogenitas berdasarkan nilai, keadilan, menekankan kerjasama, saling mendukung, dan kerja tim; 5) mendukung perkembangan karyawan, dengan melakukan aktualisasi, memajukan dan memberdayakan, mempromosikan dari dalam, menyediakan aktivitas perkembangan, dan menyediakan keamanan pada karyawan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, untuk dapat meningkatkan komitmen guru dibutuhkan workshop literasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan menghilangkan kejenuhan guru dalam melakukan implementasi GLS, sehingga guru dapat mengembangkan metode pembelajaran literasi yang kreatif dan inovatif.

Jadi berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa komitmen guru dan kepala sekolah masih pada tingkat melaksanakan program GLS dan dengan

standar minimal saja, hal ini terlihat dari hasil yang menunjukkan Continuent commitment nya masih rendah. Sangat disayangkan jika komitmen untuk melaksanakan gerakan ini tidak optimal, maka tujuan dari menumbuhkan karakter tidak akan tercapai.

5. Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi GLS

Implementasi GLS melibatkan banyak elemen yang belum tentu semuanya siap berpartisipasi. Elemen tersebut adalah warga sekolah yang terdiri atas peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua/wali murid peserta didik. Salah satu komitmen dan peran aktif kepala sekolah sangat diperlukan dalam implementasi GLS. Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi GLS merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi GLS berada dalam kategori sedang dengan rerata sebesar 69,39. Peran Kepala Sekolah memiliki nilai maksimal sebesar 100, nilai minimal sebesar 13,46, standar deviasi sebesar 15,60 dan varians sebesar 243,432.



Gambar 6. Rerata Dimensi pada Variabel Peran Kepala Sekolah per Wilayah

Peran Kepala Sekolah beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dari 15 sekolah yang disurvei dari 5 provinsi, diperoleh perbandingan Rerata Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi GLS paling tinggi yaitu SDN di Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. dengan rerata sebesar 82,21 (kategori sangat tinggi). Adapun sekolah dengan kemampuan Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi GLS paling rendah yaitu SDN Kab. Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dengan rerata sebesar 53,59 (kategori rendah).

Untuk meningkatkan implementasi GLS melalui intervensi Peran Kepala Sekolah ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah, seperti membuat tim literasi sekolah dengan membuat SK resmi. Adapun tugas dari tim literasi sekolah adalah pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah dilakukan dengan mengawal pembiasaan membaca 20 menit setiap hari; memastikan berlangsungnya program-program GLS; melaksanakan monitoring dan evaluasi internal; membangun jejaring dengan pihak eksternal termasuk pelibatan publik (penerbit, dunia pers, pengusaha, partner sekolah, masyarakat yang peduli GLS, dsb) dalam menggalang pelaksanaan GLS seta pencitraan GLS dengan berbagai cara (Supriyanto, 2017). Kepala sekolah juga harus aktif dalam pelibatan orangtua/ masyarakat dalam belbagai kegiatan implementasi GLS.

6. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan komponen penting dalam implementasi GLS. Masyarakat harus berperan aktif dalam pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Partisipasi Masyarakat merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Partisipasi Masyarakat berada dalam kategori rendah dengan rerata sebesar 49,58. Partisipasi Masyarakat memiliki nilai maksimal sebesar 100, nilai minimal sebesar 0, standar deviasi sebesar 22,69 dan varians sebesar 514.61.

Kemampuan Partisipasi Masyarakat beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dari 15 sekolah yang disurvei dari 5 provinsi, diperoleh

perbandingan Rerata Partisipasi Masyarakat per Wilayah paling tinggi yaitu siswa di SDN di Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan rerata sebesar 62,67 (kategori sedang). Adapun sekolah dengan kemampuan Partisipasi Masyarakat paling rendah yaitu siswa di SDN Kab. Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dengan rerata sebesar 29,33 (kategori rendah). Hal ini terkonfirmasi wawancara dengan kepala sekolah di Kota Sumbawa, bahwa partisipasi masyarakat ikut aktif dalam penggalangan dana dalam pembelian buku, seperti yang dikatakan kepala sekolah SDN Sumbawa.

“Masyarakat sangat aktif dalam membantu terlaksananya GLS di sekolah kami, khususnya para orangtua siswa membantu dalam ketersediaan berbagai jenis buku untuk di sumbangkan ke perpustakaan sekolah”

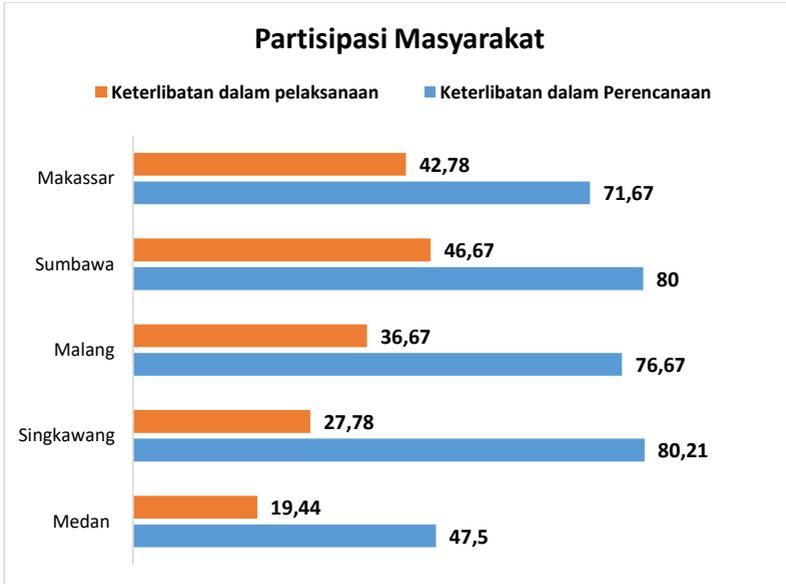
Berbeda dengan masyarakat di Kab. Tapanuli Utara, kepala sekolah mengakui untuk mencari masyarakat yang aktif dalam kegiatan literasi masih sulit.

“Partisipasi masyarakat kurang baik dalam membantu pelaksanaan GLS, kami pernah meminta beberapa orangtua siswa untuk menjadi pegiat literasi namun kurang berminat”.

Partisipasi masyarakat dinilai berdasarkan dua aspek, yakni keterlibatan dalam perencanaan dan keterlibatan dalam pelaksanaan. Oleh karena ini masyarakat harus aktif dalam implementasi GLS, bahkan masyarakat harus diikutsertakan dalam tim literasi sekolah. Dari kedua indikator tersebut, dimensi Keterlibatan dalam Perencanaan merupakan yang tertinggi dengan skor rata-rata sebesar 75 (kategori tinggi). Adapun dimensi yang paling lemah adalah Keterlibatan dalam Pelaksanaan dengan skor rata-rata sebesar 46,18 (kategori rendah).

Bila dilihat perbandingan dimensi Keterlibatan dalam Perencanaan antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, diketahui sekolah dengan siswa yang menunjukkan kemampuan partisipasi masyarakat dalam keterlibatan

dalam perencanaan paling tinggi yaitu siswa di SD Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dengan rerata sebesar 80,21 (kategori tinggi). Adapun sekolah dengan kemampuan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan paling rendah yaitu siswa SD di Kab. Tapanuli Utara dan Malang dengan rerata masing-masing sebesar 47,50 (kategori rendah).



Gambar 7. Rerata Dimensi pada Variabel Komitmen Pendidik per Wilayah

Bila dilihat perbandingan dimensi Keterlibatan dalam Pelaksanaan antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, diketahui sekolah dengan siswa yang menunjukkan Keterlibatan masyarakat dalam Pelaksanaan paling tinggi yaitu siswa SD di Sumbawa, Provinsi NTB dengan rerata sebesar 46,67 (kategori rendah). Adapun sekolah dengan kemampuan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan paling rendah yaitu siswa SD di Kab. Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dengan rerata sebesar 19,44 (kategori rendah).

Untuk meningkatkan implementasi GLS melalui intervensi partisipasi

masyarakat, masyarakat harus berperan aktif dalam mendirikan perpustakaan umum. Menurut Sutarno (2006), Perpustakaan Umum merupakan lembaga pendidikan bagi masyarakat umum dengan menyediakan berbagai informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya sebagai sumber belajar untuk memperoleh dan meningkatkan ilmu pengetahuan bagi seluruh lapisan masyarakat. Fungsinya sendiri yaitu melayani semua lapisan masyarakat dalam rangka memperoleh dan meningkatkan berbagai ilmu pengetahuan.

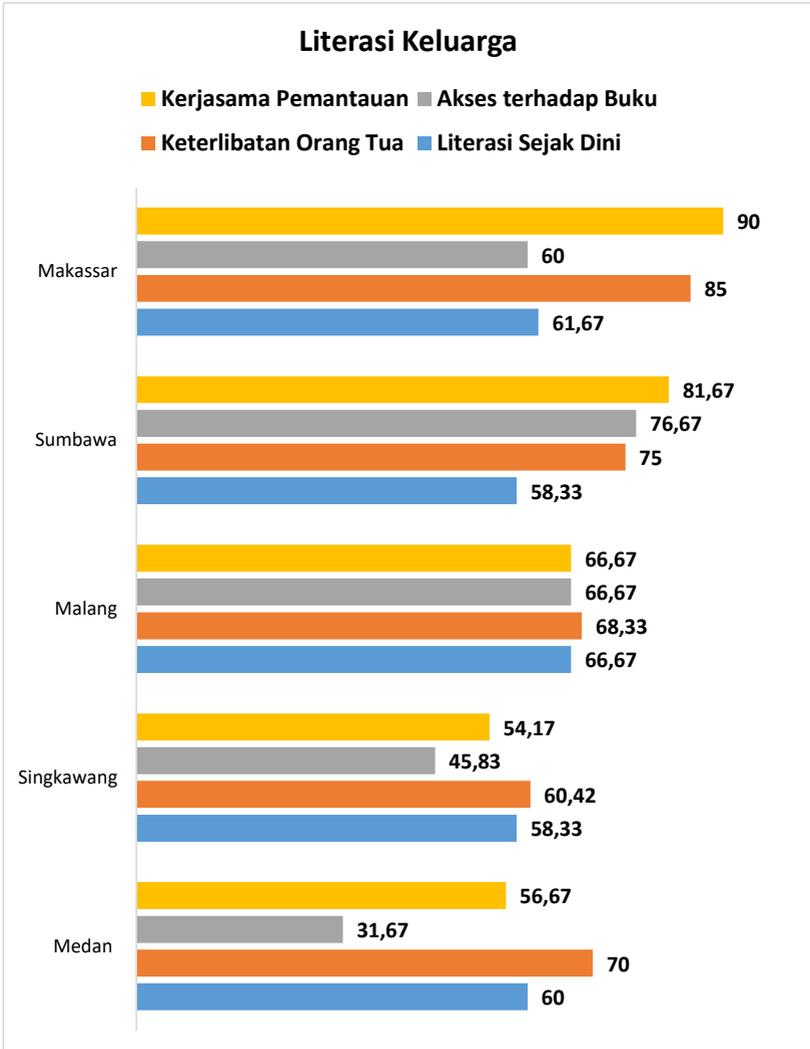
Pendirian perpustakaan umum sangat memberi dampak baik kepada pelajar dan warga. Pendirian Warung pustaka diharapkan warga belajar dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam membaca, menulis, dan berhitung sampai dengan tingkat lanjut bahkan mandiri; yang kemudian memungkinkan mereka dapat memecahkan masalah dalam kehidupannya sehari-hari termasuk masalah peningkatan ekonomi. Istilah Warung Pustaka dipilih karena akrab ditelinga masyarakat. Keberadaan Warung Pustaka ini tidak hanya dimanfaatkan oleh warga belajar, tetapi juga oleh anak-anak dan remaja di desa ini untuk menambah pengetahuan mereka karena di Warung Pustaka ini disediakan juga buku untuk anak-anak dan remaja (Wahyuni et al., 2017). Oleh karena itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam implementasi GLS.

7. Literasi Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama anak dalam mengembangkan potensinya. Oleh karena itu keluarga memiliki peran penting dalam implementasi GLS. Adapun dimensi literasi keluarga adalah bagaimana literasi anak sejak dini, bagaimana keterlibatan orangtua, bagaimana akses anak terhadap buku apakah orangtua memfasilitasi dan kerjasama dalam pemantauan anak.

Literasi Keluarga merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Literasi Keluarga berada dalam kategori sedang dengan rerata sebesar 64,50. Literasi Keluarga memiliki nilai maksimal

sebesar 100, nilai minimal sebesar 12,50, standar deviasi sebesar 20,01, dan varians sebesar 400,34.



Gambar 8. Rerata Dimensi pada Variabel Literasi Keluarga per Wilayah

Dalam variabel dukungan literasi keluarga terdapat empat dimensi, yaitu: (1) literasi sejak dini; (2) keterlibatan orang tua; (3) akses terhadap buku; (4) kerjasama pemantauan. Literasi Keluarga beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dari 15 sekolah yang disurvei dari 5 provinsi diketahui bahwa rerata literasi keluarga sekolah tertinggi berada di wilayah Makassar dengan rerata sebesar 74,17, indeks (kategori sedang). Adapun sekolah dengan Literasi Keluarga paling rendah yaitu siswa di SDN Kab. Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dengan rerata sebesar 54,58 (kategori rendah). Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah SD di Kota Makassar, bahwa orangtua berpartisipasi aktif dalam GLS dengan ikut serta menghias ruangan kelas dan orangtua membelikan buku untuk sekolah.

Bila dilihat perbandingan dimensi literasi sejak dini antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, diketahui sekolah dengan siswa yang menunjukkan literasi keluarga paling tinggi yaitu siswa di SD Malang Provinsi Jawa Timur dengan rerata sebesar 66,67 (kategori sedang). Adapun sekolah dengan literasi keluarga paling rendah yaitu siswa SD Sumbawa dan Singkawang masing-masing 58,33 (kategori sangat sedang).

Bila dilihat perbandingan dimensi keterlibatan orang tua satu wilayah dengan wilayah lainnya, diketahui sekolah dengan siswa yang menunjukkan literasi keluarga paling tinggi yaitu siswa SD di Makasar, Sulawesi Selatan dengan rerata sebesar 85 (kategori sangat tinggi). Adapun sekolah dengan literasi keluarga paling rendah, indikator keterlibatan orang tua yaitu siswa SD di Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dengan rerata sebesar 60,42 (kategori rendah).

Bila dilihat perbandingan dimensi akses terhadap buku antara wilayah dengan wilayah lainnya, diketahui sekolah dengan siswa yang menunjukkan literasi keluarga paling tinggi yaitu siswa SD di Sumbawa, NTB dengan rerata sebesar 76,67 (kategori sedang). Adapun sekolah dengan literasi keluarga paling rendah yaitu siswa SD di Kab. Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dengan rerata sebesar 31,67 (kategori rendah).

Bila dilihat perbandingan dimensi kerjasama pemantauan antara satu antara wilayah dengan wilayah lainnya, diketahui sekolah dengan siswa yang menunjukkan literasi keluarga paling tinggi yaitu siswa SD di Makasar, Sulawesi Selatan dengan rerata sebesar 90 (kategori tinggi). Adapun sekolah dengan literasi keluarga paling rendah yaitu siswa SD di Singkawang, Kalimantan Barat dengan rerata sebesar 54,17 (kategori rendah).

Untuk dapat meningkatkan indikator-indikator dalam variabel literasi keluarga ada beberapa hal yang dapat dilakukan menurut Saracho (2002), yakni keluarga harus membangun lingkungan rumah yang mendukung pembelajaran dan pengembangan diri anak, merancang beberapa bentuk komunikasi antara orangtua dan sekolah dalam rangka mendukung implementasi GLS, meningkatkan keterlibatan orangtua disekolah, membantu orangtua dalam mengembangkan literasi keluarga berupa modul atau buku panduan literasi keluarga, dan melibatkan orang tua dalam pengambilan keputusan terkait program GLS. Program GLS harus sampai kepada orangtua agar terjadi sinergi antara sekolah dan di rumah. Perlu adanya propaganda dalam memasyarakatkan GLS misalnya melalui media televisi.

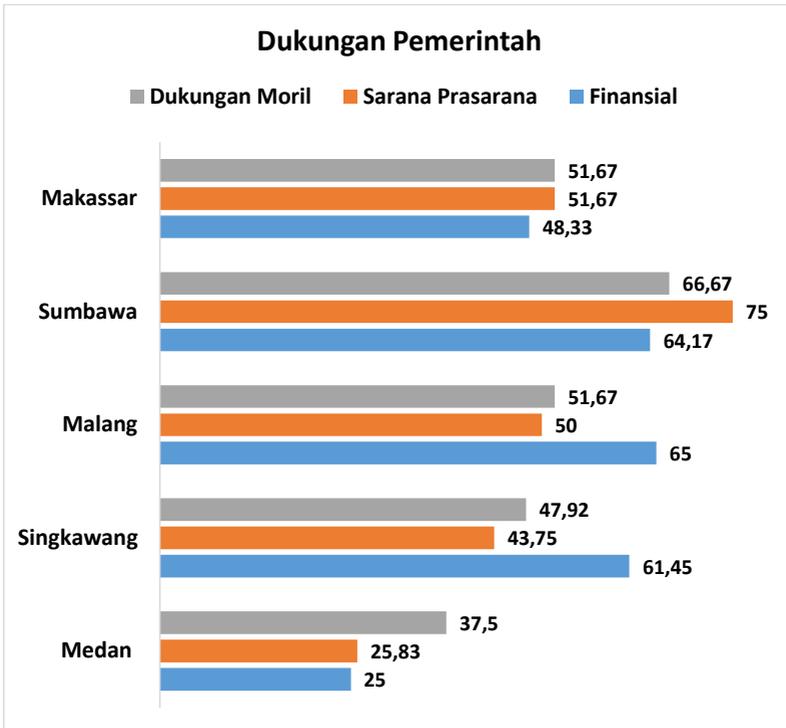
8. Deskripsi Dukungan Pemerintah

Dukungan Pemerintah merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Dukungan pemerintah berada dalam kategori sedang dengan rerata sebesar 64,50. Dukungan pemerintah memiliki nilai maksimal sebesar 100, nilai minimal sebesar 0, standar deviasi sebesar 23,56, dan varians sebesar 555,07.

Dalam variabel Dukungan Pemerintah terdapat tiga dimensi, yaitu: (1) finansial; (2) sarana prasarana; (3) dukungan moril. Dukungan Pemerintah beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dari 15 sekolah yang disurvei dari 5 provinsi, diperoleh rerata dukungan Pemerintah paling tinggi yaitu siswa di SDN di Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan

rerata sebesar 73,33, indeks (kategori sedang). Adapun sekolah dengan Dukungan Pemerintah paling rendah yaitu siswa di SDN Kab. Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dengan rerata sebesar 29,44 (kategori sangat rendah).

Bila dilihat perbandingan dimensi dukungan moril antara wilayah dengan wilayah lainnya (Gambar 9), diketahui sekolah dengan siswa yang menunjukkan dukungan pemerintah paling tinggi yaitu siswa SD di Sumbawa, NTB dengan rerata sebesar 66,67 (kategori sedang). Adapun sekolah dengan dukungan pemerintah paling rendah yaitu siswa SD di Kab. Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dengan rerata sebesar 37,50 (kategori rendah).



Gambar 9. Rerata Dimensi pada Variabel Dukungan pemerintah per Wilayah

Bila dilihat perbandingan dimensi sarana prasarana satu wilayah dengan wilayah lainnya (Gambar 9), diketahui sekolah dengan siswa yang menunjukkan dukungan pemerintah paling tinggi yaitu siswa SD di Sumbawa, NTB dengan rerata sebesar 75 (kategori tinggi). Adapun sekolah dengan dukungan pemerintah paling rendah, dimensi sarana prasarana yaitu siswa SD di Kab. Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dengan rerata sebesar 25,83 (kategori rendah). Semua sekolah yang disurvei menunjukkan adanya keterbatasan bahan bacaan, baik di perpustakaan maupun pojok baca di dalam kelas. Buku bacaan masih didominasi dengan buku mata pelajaran (buku paket) sesuai dengan kurikulum 2013. Kurangnya dukungan pemerintah dalam pengadaan sarana prasarana yang mendukung gerakan literasi sekolah membuat capaian implementasi GLS belum optimal.

Bila dilihat perbandingan dimensi finansial satu wilayah dengan wilayah lainnya (Gambar 9), diketahui sekolah dengan siswa yang menunjukkan dukungan pemerintah paling tinggi yaitu SD di kota Malang, Jawa Timur dengan rerata sebesar 6 (kategori sedang). Adapun sekolah dengan dukungan pemerintah paling rendah pada dimensi finansial adalah SD di Kab. Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dengan rerata sebesar 25 (kategori rendah). Syafik (2016) yang menyebutkan faktor penghambat program sekolah dari aspek dukungan pemerintah meliputi bantuan dana tidak merata, relatif kecil, nara sumber ahli yang terbatas, dan bantuan yang kurang mendukung pelaksanaan program.

Cohen & Bhatt (2012) menyebutkan ada tiga faktor yang menyebabkan rendahnya literasi, yaitu kurangnya infrastruktur pendidikan (termasuk untuk literasi), desentralisasi system pengelolaan, dan pengorganisasian pembelajaran.

Untuk dapat meningkatkan indikator dukungan sarana prasarana dalam variabel dukungan pemerintah ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Pemerintah dapat: (1) membuat kebijakan yang menetapkan standard pembiayaan sekolah untuk pembiayaan GLS; dan (2) membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam mendukung implementasi GLS, baik

dalam bentuk pembiayaan maupun pengadaan sarana dan prasarana (Cohen & Bhatt, 2012). Jogani (2015) menyatakan: “*schooling infrastructure can contribute to the literacy of a region and help decrease the gender gap in literacy*” yang berarti bahwa infrastruktur sekolah dapat berkontribusi terhadap kemampuan literasi. Untuk meningkatkan literasi maka diperlukan kajian alokasi biaya dan penggalangan dana untuk pembiayaan program literasi, seperti penyediaan buku teks (Jogani, 2015).

B. GAMBARAN IMPLEMENTASI GLS DI INDONESIA

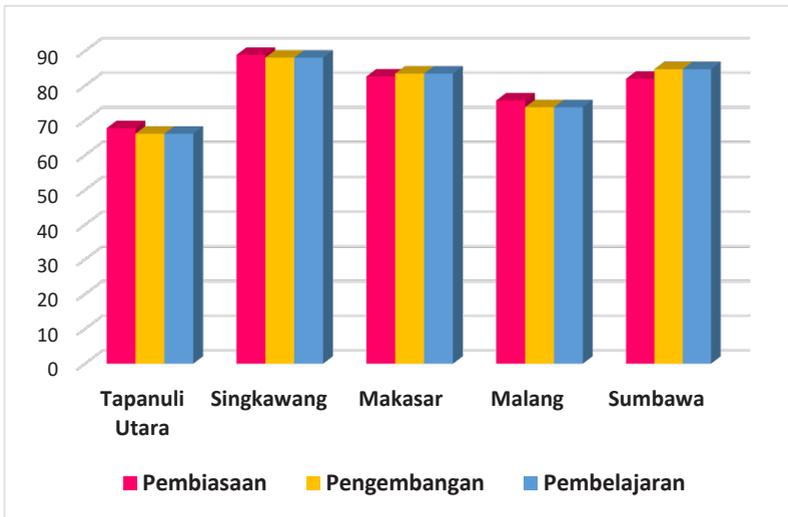
Implementasi GLS dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sekolah di seluruh Indonesia. Kesiapan ini mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi gerakan literasi sekolah. GLS di sekolah dasar dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu tahap pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Tahap pembiasaan dilakukan untuk tujuan menumbuhkan minat peserta didik terhadap bacaan. Tahap pengembangan bertujuan untuk mempertahankan minat baca peserta didik sekaligus meningkatkan kelancaran dan pemahaman mereka terhadap buku bacaan. Tahap pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa represif (membaca dan menyimak) dan aktif (menulis dan berbicara).

Implementasi GLS beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini tergantung dari kesiapan sekolah-sekolah tersebut. Terdapat 11 sekolah yang telah menerapkan GLS hingga tahap pembelajaran, dan 4 sekolah yang baru menerapkan tahap pembiasaan (Tabel 2).

Tabel 2. Tahapan Implementasi GLS

No.	Provinsi	Kota/Kab	Sekolah	Akre- ditasi	Tahapan Implementasi GLS
1.	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Utara Kec. Tarutung	SD Negeri 173102	A	Pembelajaran
			SD Negeri 173100	B	Pembelajaran
			SD Negeri 173104	B	Pembiasaan
2.	Kalimantan Barat	Kota Singkawang Kec. Singkawang Selatan	SDN 51	A	Pembelajaran
			SDN 47	B	Pembelajaran
			SDN 49	C	Pembelajaran
3	Jawa Timur	Kota Malang kec. Lowokwaru dan kec. Belimbing	SDN Jatimulyo 3	A	Pembiasaan
			SD NU Belimbing	B	Pembelajaran
			SDN Tunggulwulung 1	B	Pembelajaran
4	Sulawesi Selatan	Kota Makasar Kec. Rappocini	SDN IKIP 1	A	Pembelajaran
			SDN Gunung Sari 1	B	Pembelajaran
			SDN Gunung Sari 1	C	Pembelajaran
5	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa Kec. Sumbawa	SDN 1 Sumbawa Besar	A	Pembiasaan
			SDN 2 Sumbawa Besar	B	Pembelajaran
			SDN 3 Sumbawa Besar	C	Pembiasaan

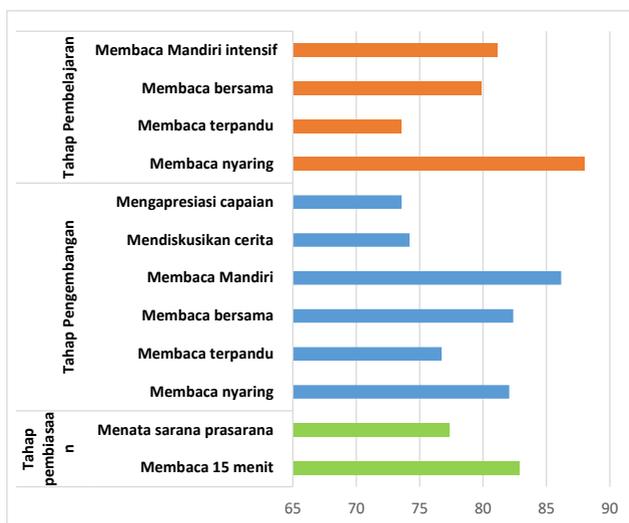
Dari 15 sekolah yang disurvei dari 5 provinsi, diketahui 4 sekolah berada pada tahap pembiasaan, dan 11 sekolah telah samapi pada tahap pembelajaran. Rerata dimensi pada tahap implementasi GLS setiap wilayah dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 10. Rerata Dimensi pada Tahap Implementasi GLS per Wilayah

Jika dilihat perbandingan dimensi di setiap wilayah (Gambar 10), diketahui bahwa tahap pembiasaan, pengembangan, pembelajaran paling tinggi terdapat di SD Singkawang, Kalimantan Barat dengan rerata 88,36 (kategori tinggi). Adapun sekolah dengan implementasi GLS paling rendah yaitu siswa SD Kab. Tapanuli Utara Sumatera Utara sebesar 66,72 (kategori rendah). Implementasi GLS ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menjadi faktor penentu. Rendahnya implementasi GLS pada SD Kab. Tapanuli Utara Sumatera Utara sejalan dengan rendahnya seluruh faktor implementasi GLS di Tapanuli Utara.

Perbandingan antar tahapan implementasi GLS (Gambar 10) diketahui pada tahap pembiasaan dari 15 sekolah dengan rerata 80,38 (kategori tinggi), pada tahap pengembangan dari 11 sekolah dengan rerata 79,2 (kategori tinggi), dan pada tahap pembelajaran dari 11 sekolah memiliki rerata 81,83 (kategori tinggi). Hal ini berarti sekolah sudah melakukan implementasi GLS dengan baik. Hal tersebut dikarenakan indikator kegiatan GLS pada setiap tahap sudah jelas tertuliskan di panduan GLS, sehingga sekolah dapat mengimplementasikan setiap tahapan sesuai panduan tersebut.



Gambar 11. Rerata Indikator Pada Tahapan GLS

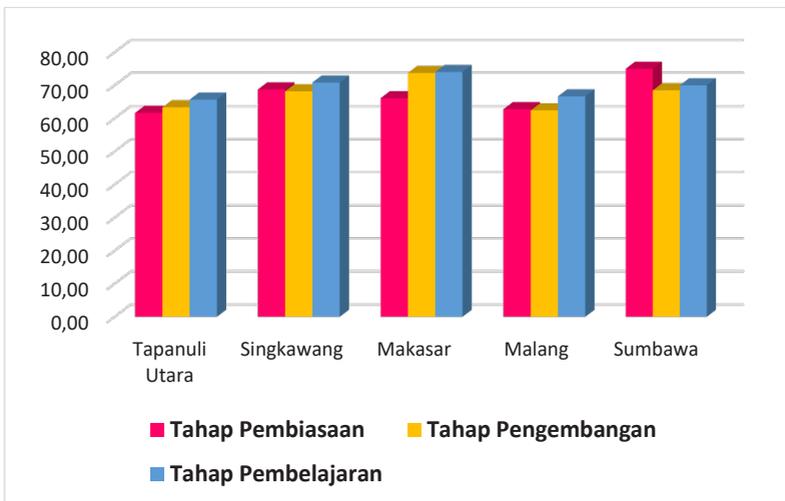
Pada tahap pembiasaan seluruh indikator telah berada pada kategori tinggi (>75,00). Artinya sekolah sudah melakukan implementasi GLS dengan baik pada tahap pembiasaan. Pada tahap pengembangan, diketahui bahwa terdapat 2 indikator yang masih berada pada kategori sedang (>50 - <75), yaitu mengapresiasi capaian dan mendiskusikan cerita. Artinya 11 sekolah rata-rata belum melakukan keseluruhan indikator implementasi GLS pada tahap pengembangan dengan baik baru melanjutkan ke tahap pembelajaran. Pada tahap pembelajaran seluruh indikator telah berada pada kategori tinggi (>75,0). Artinya sekolah sudah melakukan implementasi GLS dengan baik sesuai indikator pada tahap tersebut. Tahapan GLS seharusnya dilakukan secara bertahap, apabila tahap pengembangan belum tercapai dengan baik sebaiknya sekolah belum melanjutkan ke tahap pembelajaran guna tercapainya tujuan dari GLS.

C. GAMBARAN KEMAMPUAN LITERASI SISWA DI INDONESIA

Gerakan literasi sekolah merupakan salah satu program yang bertujuan

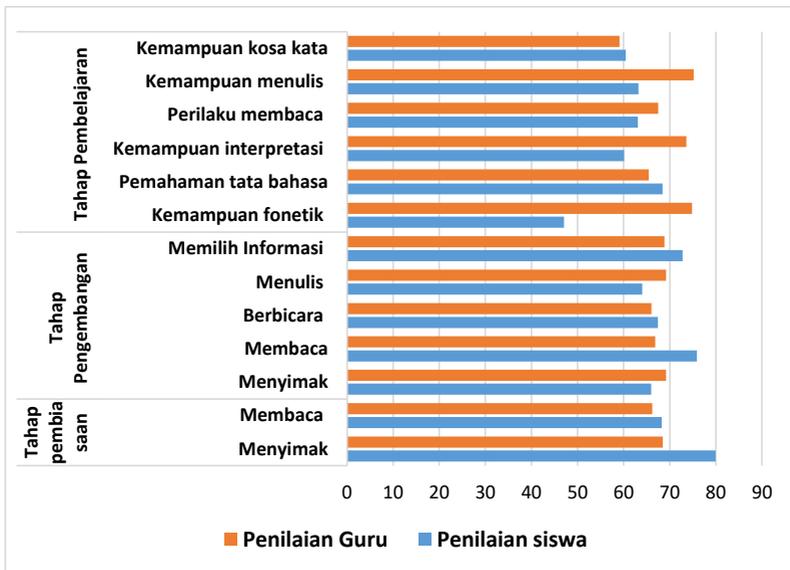
menumbuhkan karakter budi pekerti peserta didik. Berdasarkan Permendikbud no 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti, menyatakan bahwa perlunya sekolah menyisihkan waktu secara berkala untuk pembiasaan membaca sebagai bagian dari penumbuhan budi pekerti. Anak-anak yang memperlihatkan kemampuan membaca yang baik akan menunjukkan sikap yang lebih positif dibandingkan dengan anak-anak yang memiliki masalah dalam kegiatan membaca (Mullis, dalam Hayat & Yusuf, 2010).

Dalam melakukan evaluasi program GLS perlu adanya penilaian ketercapaian implementasi untuk mengukur keberhasilan program tersebut. Penilaian ketercapaian implementasi GLS dapat diukur melalui kemampuan literasi siswa. Kemampuan literasi merupakan salah satu indikator keberhasilan dari GLS. Kemampuan literasi siswa per tahap implementasi GLS di 5 wilayah berbeda dapat dilihat di Gambar 12.



Gambar 12. Kemampuan literasi siswa per tahap implementasi GLS

Kemampuan literasi siswa per tahapan implementasi GLS di seluruh wilayah masih dalam kategori sedang ($>50 < 75$). Artinya hasil yang dicapai dalam implementasi GLS belum tercapai secara maksimal di tahap pembiasaan, namun 11 sekolah sudah menaikkan tahap hingga pembelajaran. Sebaiknya GLS dilakukan secara bertahap tidak hanya dengan mengukur ketercapaian indikator program GLS namun juga ketercapaian kemampuan literasi siswa. Wibowo (2012) menyatakan langkah-langkah penilaian ketercapaian implementasi pendidikan karakter meliputi penetapan indikator dari nilai-nilai yang disepakati, penyusunan instrumen penilaian, pencatatan pencapaian indikator, analisis hasil penilaian, dan tindak lanjut penilaian. Oleh karena itu perlu adanya penilaian ketercapaian implementasi GLS dan penetapan standar penilaian kemampuan literasi siswa, dimana standar tersebut menunjukkan tujuan dari tahapan tersebut telah tercapai sehingga sekolah dapat menaikkan tahapan implementasi GLS.



Gambar 13. Kemampuan literasi siswa per indikator tahapan Implementasi GLS berdasarkan penilaian guru dan siswa

Kemampuan literasi siswa diukur oleh penilaian guru dan dikonfirmasi dengan penilaian siswa itu sendiri. Kemampuan literasi siswa berdasarkan penilaian guru dan siswa dapat dilihat pada Gambar 13.

Pada tahap pembiasaan, kemampuan membaca dan menyimak siswa pada 15 sekolah masih dalam kategori sedang ($>50 - <75$). Untuk dapat meningkatkan indikator membaca ada beberapa hal yang dapat dilakukan dengan mengoptimalkan implementasi GLS sesuai dengan ketentuan. Khusus dalam membaca 15 menit, perlu dikembangkan melalui pembiasaan yang intensif, penyediaan pojok baca dengan koleksi buku yang banyak, beragam dan menarik minat baca siswa, serta penyediaan dinding literasi di kelas untuk merekam jejak baca setiap siswa. Kegiatan membaca 15 menit belum optimal karena kebanyakan ketika membaca atau dibacakan cerita hanya dilakukan lewat lisan atau pertanyaan guru (Azis, 2017).

Pada tahap pengembangan, kemampuan literasi siswa berdasarkan penilaian guru dari 11 sekolah berada pada kisaran 66,03-69,18 (kategori sedang). Rerata terendah terdapat pada kemampuan berbicara dan tertinggi terdapat pada kemampuan menyimak. Namun pada tahap pembelajaran, terjadi kenaikan kemampuan membaca dan menulis. Artinya implementasi GLS memberikan peningkatan kemampuan literasi pada siswa walaupun belum maksimal. Akhir dari tujuan GLS serta capaian setiap tahap kemampuan tertinggi adalah menjadikan siswa mampu berpikir kritis atas apa yang dibacanya. Kemampuan menyimak masih dalam tahapan yang menggambarkan bahwa siswa masih pasif. Hal ini sesuai dengan taksonomi Bloom bahwa kemampuan memahami dan menyimak masih pada level C1.

Kemampuan literasi siswa juga dilakukan dengan tes pemahaman bacaan sebanyak 10 soal. Kemampuan Literasi Siswa berada dalam kategori sedang dengan rerata sebesar 73,06. Data variabel Kemampuan Literasi Siswa memiliki nilai maksimal sebesar 93,33, nilai minimal sebesar 33,33, standar deviasi sebesar 12,35, dan varians sebesar 152,59. Hasil tersebut menunjukkan kemampuan literasi siswa cukup namun masih bisa ditingkatkan lagi.

D. FAKTOR DETERMINAN GLS DI INDONESIA

Berdasarkan kajian dan temuan dilapangan, terdapat keterkaitan antara *self-directed learning* dengan ketercapaian program GLS, artinya semakin baik *self-directed learning* siswa maka semakin baik juga ketercapaian program GLS. Hal ini sesuai dengan hasil temuan yang dilakukan oleh Lai (2011) yang menyatakan bahwa *self-directed learning* berkorelasi positif dengan literasi. Variabel *self-directed learning* cukup kuat mempengaruhi ketercapaian program GLS, oleh sebab itu dorongan dari guru di sekolah penting untuk meningkatkan *self-directed learning* siswa sehingga program GLS dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan tujuan dari program GLS itu sendiri yaitu membentuk karakter siswa sebagai penumbuh budi pekerti. Hal ini memnag harus dilakukan agar kebiasaan membaca dapat tumbuh dari dalam diri siswa, mulai dari kebiasaan sampai membaca menjadi suatu kebutuhan.

Selain *self-directed learning*, sarana literasi determinan dengan ketercapaian program GLS. Semakin baik sarana literasi sekolah maka semakin baik juga ketercapaian program GLS. Temuan Megasari (2014) yang menyatakan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yang baik akan memberi dampak positif terhadap siswa-siswa dalam proses belajar mengajar dan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sarana dan prasarana memegang peranan penting karena sarana dan prasarana merupakan alat yang digunakan untuk memfasilitasi pembiasaan anak dalam membaca seperti ketersediaan buku-buku, tempat menyimpan buku dan sebagainya.

Kuangan sekolah menajadi hal yang cukup menentukan yang terlaksananya GLS. Dukungan keuangan tentunya akan mempengaruhi ketercapaian program GLS di sekolah, namun dukungan keuangan sekolah bukanlah kunci utama kebutuhan dalam implementasi GLS, banyak faktor lain yang mempengaruhi ketercapaian program GLS. Dukungan keuangan sekolah dapat menjadi penyempurna dalam ketercapaian program GLS untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Hal ini sesuai

dengan fakta di lapangan, dimana dukungan keuangan sekolah masih kurang, karena pengalokasian dana BOS yang diberikan ke sekolah setiap wilayah untuk mendukung GLS relatif rendah, contohnya di Kab. Tapanuli Utara alokasi dana untuk GLS hanya 5%. Padahal berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2019 alokasi dana BOS untuk pembelian buku teks dan non teks sebesar 20%. Hal ini yang menyebabkan minat baca siswa masih rendah karena keterbatasan kepemilikan koleksi buku di sekolah.

Komitmen pendidik dalam hal ini guru memberi kontribusi dalam ketercapaian program GLS. Hal itu berarti bahwa komitmen pendidik dampak positif terhadap ketercapaian program GLS, artinya semakin baik komitmen pendidik maka semakin baik juga ketercapaian program GLS. Hal ini ditegaskan oleh Hakiki (2019) yang menyatakan bahwa peran guru menjadi teladan, motivator, dan fasilitator yang baik maka keberhasilan dalam literasi akan baik, dengan literasi yang baik peserta didik dapat memiliki *civic knowledge* yang baik pula. Determinan Komitmen pendidik cukup kuat hal ini disebabkan karena guru memiliki komitmen terhadap sekolah untuk dapat mencapai tujuan sekolah dalam menyukseskan gerakan literasi sekolah. Ujung tombak penyelenggaraan pendidikan adalah komitmen para guru kelas dalam melakukan berbagai fleksibilitas tanggungjawabnya sebagai guru. Baron dan Greenberg (1990) menyatakan bahwa komitmen memiliki arti penerimaan yang kuat individu terhadap tujuan dan nilai-nilai sekolah, di mana individu akan berusaha dan berkarya serta memiliki hasrat yang kuat untuk tetap bertahan di sekolah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara semua guru di lima wilayah mengimplementasikan gerakan literasi sekolah dengan pemantauan kepala sekolah.

Peran Kepala Sekolah dalam ketercapaian program GLS memberi dampak baik dengan ketercapaian implementasi GLS. Hal ini ditegaskan oleh Rahayu (2016) yang menyatakan bahwa peran aktif kepala sekolah sangat berpengaruh untuk memfasilitasi pengembangan literasi di sekolah. Keterlibatan sekolah melalui Peran Kepala Sekolah sangatlah penting dalam

pelaksanaan suatu program dalam mengembangkan budaya berkualitas di sekolah. Budaya literasi sekolah sangatlah diperlukan, selain untuk meningkatkan mutu pembelajaran, literasi sekolah juga bertujuan untuk memfasilitasi dan mengembangkan kemampuan siswa, membiasakan membaca serta mengelola informasi yang mereka peroleh, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna, bermutu dan menyenangkan (Akbar, 2017).

Partisipasi masyarakat memberi peran yang baik dalam ketercapaian implementasi program GLS. Masyarakat memang mempunyai tanggung jawab moral dalam mendukung GLS di sekolah dalam hal ini orang tua siswa. Selain itu keberadaan Lembaga sebagai CSR dapat dilibatkan dalam mensukseskan GLS. Keterlibatan masyarakat sangat penting. Tinggal bagaimana kepala sekolah dapat menarik masyarakat untuk dapat terlibat didalamnya. Dalam setiap pembentukan karakter, lingkungan masyarakat sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu. Selain partisipasi masyarakat peran keluarga tidak kalah penting dalam implementasi GLS.

Literasi keluarga yang baik akan menciptakan anak-anak yang gemar membaca. Orang tua harus memberi contoh dalam bentuk tindakan kepada anaknya. Hal ini ditegaskan oleh Christian et al., (1998) yang menyatakan bahwa literasi keluarga memberi dampak baik pada prestasi akademik anak, yang berarti semakin baik literasi keluarga maka literasi anak. Jika demikian maka implementasi program GLS di sekolah akan berjalan dengan baik juga. Seperti telah diketahui bersama bahwa keluarga merupakan tempat pendidikan anak yang pertama dan utama. Orang tua atau keluarga sangat mengetahui kebutuhan anak sehingga orang tua pasti akan mendukung GLS ini dalam rangka pembentukan karakter anak.

Dukungan pemerintah tidak kalah penting dalam ketercapaian implementasi program GLS. Kondisi di lapangan bahwa GLS sebagai salah satu program pemerintah masih berdiri sendiri belum terkoordinasi dengan program lain pada instansi atau Lembaga lainnya, sehingga terlihat lemah hubungan tersebut. Hal ini menjadi perhatian bersama bahwa GLS adalah

program yang sangat baik dan dalam pelaksanaannya alangkah baiknya didukung oleh instansi atau lembaga lain seperti Perpustakaan Nasional, BKKBN, Kementerian Kesehatan dan lain-lain. Dukungan dapat berupa pengiriman atau hibah buku kepada sekolah-sekolah mengingat sebagian besar sekolah berada di daerah-daerah yang masih minim akses untuk mendapatkan buku.

E. EVALUASI GERAKAN LITERASI SEKOLAH

Suatu program akan terlaksana dengan baik apabila terdapat evaluasi terhadap program tersebut, begitu juga dengan program GLS. Dalam pelaksanaan GLS banyak faktor menjadi penyebab suksesnya GLS di Indonesia. Oleh karena itu setiap pihak yang terkait harus melakukan evaluasi dalam menyukseskan program GLS, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, guru, kepala sekolah dan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga dinas pendidikan di daerah harus memberi perhatian khusus dalam menyukseskan GLS pada setiap wilayah. Membuat pelatihan kepada para pegiat literasi secara rutin, penyediaan buku yang beragam pada setiap sekolah dan memperbaiki sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah dalam peningkatan GLS. Guru perlu memilih metode dan strategi pembelajaran yang tepat digunakan untuk meningkatkan *self-directed learning*. Guru juga secara rutin mengevaluasi peningkatan *self-directed learning* pada siswa.

Selain peran guru, peran sekolah juga diperlukan dievaluasi. Sekolah harus menyediakan sarana literasi seperti, sudut buku kelas, perpustakaan dan area baca perlu menjadi perhatian sekolah, selain itu jenis bacaan yang beragam seperti buku cerita bergambar, buku tanpa teks, buku teks sederhana, buku fiksi, buku nonfiksi, buku bergambar kaya akan teks dan buku novel pemula dalam rangka mengimplementasikan GLS. Sekolah harus memiliki manajemen keuangan yang baik. Sekolah harus menggunakan dana yang ada secara transparan, akuntabilitas, efektifitas, dan efisien. Sekolah sebaiknya menggunakan dan BOS 20% untuk pengadaan

buku sesuai peraturan penggunaan Dana BOS. Sekolah dapat memberikan reward kepada guru dan siswa yang berprestasi dalam bidang literasi. perlu adanya reward yang diberikan kepada guru apabila dapat menyukseskan gerakan implementasi sekolah.

Kepala sekolah harus kreatif dalam pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan. Kepala sekolah dapat bekerjasama dengan perpustakaan seluruh indonesia untuk pengadaan buku hasil pemutihan perpustakaan. Kepala sekolah dapat bekerjasama dengan universitas yang memiliki program studi ilmu perpustakaan untuk dapat PKL di sekolah menjadi pustakawan. Kepala sekolah membuat tim literasi sekolah dengan membuat SK resmi. Kepala sekolah Memastikan berlangsungnya program-program GLS serta melaksanakan monitoring dan evaluasi internal. Membangun jejaring dengan pihak eksternal termasuk pelibatan publik (penerbit, dunia pers, pengusaha, partner sekolah, masyarakat yang peduli GLS, dsb) dalam menggalang pelaksanaan GLS, baik dalam bentuk pembiayaan maupun pengadaan sarana dan prasarana. Kepala sekolah juga harus aktif dalam pelibatan orangtua/ masyarakat dalam berbagai kegiatan implementasi GLS.

B A B V

PENUTUP

Implementasi GLS yang dilakukan di 5 wilayah berbeda menunjukkan 15 sekolah telah melakukan implementasi GLS yang baik pada tahap pembiasaan dan 11 sekolah telah melakukan implementasi GLS yang baik pada tahap pembelajaran yang ditunjukkan dengan kategori yang tinggi, namun hasil kemampuan literasi siswa masih dalam kategori sedang. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menjadi penentu dalam GLS. Terdapat delapan faktor penentu memberikan hubungan yang baik dalam ketercapaian implementasi GLS.

Faktor yang paling menentukan ketercapaian GLS adalah Peran Kepala Sekolah, diketahui bahwa Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi GLS berada dalam belum terlalu maksimal, yang artinya kepala sekolah memiliki komitmen dalam menerapkan GLS namun masih pada melaksanakan sesuai ketentuan yang ada, belum sampai pada tahap memberikan inovasi dan menjadi penggiat untuk memajukan GLS. Oleh karena itu diharapkan kepala sekolah dapat lebih aktif dalam menggerakkan literasi di sekolah dengan menjadi pegiat literasi. Faktor penentu selanjutnya adalah literasi keluarga. Hal tersebut dikarenakan keluarga merupakan tempat pendidikan anak yang pertama dan utama. Namun berdasarkan kondisi di lapangan diketahui bahwa Literasi Keluarga belum terlaksana dengan maksimal,

yang artinya keluarga belum mendukung secara penuh implementasi GLS di sekolah untuk kemudian dilanjutkan dirumah, seperti memberikan literasi sejak dini, memberikan akses terhadap buku, dan melakukan kerjasama pemantauan dengan sekolah. Hal ini berdampak implementasi GLS berhenti di sekolah, dan menyebabkan kemampuan literasi siswa belum tercapai secara maksimal.

Self-directed learning merupakan kemampuan siswa memiliki keinginan belajar mandiri, tentu hal ini bisa terwujud dengan bantuan guru dan orangtua. Namun berdasarkan *self-directed learning* siswa masih cukup rendah, artinya *self directing learning* siswa termasuk biasa saja. Hal ini menunjukkan tahap pembiasaan belum maksimal dilakukan sehingga tujuan pada tahap pembiasaan yaitu menumbuhkan minat peserta didik terhadap bacaan belum tercapai. Kurangnya minat peserta didik terhadap bacaan menyebabkan peserta didik tidak menyadari kebutuhan sendiri dalam belajar, mengatur tujuan pribadi, membuat keputusan pada sumber dan strategi belajar dan menilai hasil. Kondisi tersebut juga ditunjukkan dari kemampuan literasi siswa pada tahap pembiasaan masih dalam kategori sedang. Namun belum maksimalnya capaian kemampuan literasi siswa, sekolah sudah meningkatkan tahapan implementasi ke tahap pengembangan dan pembelajaran. Sehingga menyebabkan *self directing learning* belum benar-benar tumbuh pada siswa namun siswa sudah dihadapkan dengan tahapan yang lebih tinggi. ketika Hal inilah yang menyebabkan kemampuan literasi siswa masih dalam kategori sedang walaupun implementasi yang dilakukan sekolah sudah dalam kategori tinggi.

Faktor penentu terakhir adalah partisipasi masyarakat. Pelaksanaan di lapangan menunjukkan partisipasi masyarakat masih cukup rendah, artinya masyarakat belum memiliki kesadaran dan kepedulian dalam GLS. Padahal implementasi GLS di sekolah membutuhkan dukungan partisipasi dari masyarakat, hasil kemampuan literasi siswa tidak akan dapat maksimal apabila siswa tidak menerapkannya diluar sekolah seperti dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Oleh karena itu perlunya dukungan dan

kepedulian masyarakat pula dalam mendukung GLS sehingga mampu menciptakan generasi bangsa yang memiliki kemampuan literasi dan karakter yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. 2017. *Membudayakan Literasi dengan Program 6M di Sekolah Dasar*. Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar, 3(1), 42-52.
- Anthony, R.N., 1988. *The management control function*. Harvard Business School Press.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S., dkk. 2008. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Aksara
- Arsah K dan Nurritzati. 2018. Partisipasi Masyarakat Padang Panjang Terhadap Kegiatan Literasi Di Perpustakaan Daerah Kota Padang Panjang. *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*. Vol. 7, No. 1. Seri A
- Astuti, Tri. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Pendidikan Nonformal Di Dusun Saman Ii, Bangunharjo, Sewon, Bantul (skripsi). Yogyakarta, Fakultas Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Azis, M. S. 2017. *Implementasi Kultur Literasi Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca, Menulis dan Berpikir Kritis Siswa SD Plus Al Kautsar Malang*. [Skripsi]. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemdikbud. 2013. *Laporan Studi Kajian Peserta Didik pada Tingkat Dasar dan Menengah*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan

- Baron, R.A. and J. Greenberg. 1990. *Behavior in Organization: Understanding and Managing the Human Side of Work, Third Edition*. Toronto: Allyn and Bacon.
- Christian, K., Morrison, F. J., & Bryant, F. B. 1998. Predicting kindergarten academic skills: Interactions among child care, maternal education, and family literacy environments. *Early Childhood Research Quarterly*, 13(3), 501-521.
- Cohen, David K., and Bhatt, Monica P. 2012. The Importance of Infrastructure Development to High Quality Literacy Instruction. *The Future of Children*. Vol. 22 No. 2. (2012).
- Dana Desa Diusulkan Bisa Digunakan Untuk Program Literasi. 2018. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/09/04/pej1ak366-desa-miskin-sumber-buta-aksara>. Diakses tanggal 17 Desember 2018
- Fanani, Anas. 2017. Faktor – Faktor Penghambat Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah Di Smp Negeri 2 Trimurjo Tahun Pelajaran 2016/2017 [SKRIPSI]. Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Departemen Pendidikan Nasional. 2004. Perpustakaan Perguruan Tinggi: Buku Pedoman. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*. Depdiknas RI : Jakarta.
- Dessler, Gary. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT.Index. Hlm 69
- Fattah, Nanang. 2004. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy. Hlm 47
- Fanani, A. 2017. *Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah di SMP Negeri 2 Trimurjo Tahun Pelajaran 2016/ 2017*[SKRIPSI]. Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Ferguson. 2001. www.bibliotech.us/pdfs/InfoLit.pdf. Diakses 17 Desember 2018

- Ferguson, B. 2003. Information Literacy. A Primer for Teachers, Librarians, and other Informed People. International Conference of Information Literacy in Prague, Cech. (www.bibliotech.us/pdfs/InfoLit.pdf)
Diakses tanggal 15 Desember 2018
- Gibbons, M. 2002. *The self-directed learning handbook: Challenging adolescent students to excel*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Gibbons, M. 2003. *The self-directed learning handbook: Challenging adolescent students to excel*. John Wiley & Sons. <http://scdc.binus.ac.id/himpgsd/2017/03/saranadanprasaranapendidikan/>. Diakses 2 Oktober 2019
- Hakiki, N.H. 2019. *Peranan Guru dalam Pelaksanaan Program Gerakan Literasi Sebagai Upaya Pembentukan Civic Knowledge di SMP Negeri 2 Metro Tahun Pelajaran 2018/2019*. [Skripsi]. Lampung : Universitas Lampung.
- Hanushek, E. A. dan Wobmann, L. 2007. "The Role of Education Quality in Economic Growth." World Bank Policy Research Working Paper No.4122. Public Discussion Authorization
- Harahap M.H, Faisal, Hasibuan N.I, Nugrahaningsih, Azis A.C.K. 2017. Pengembangan Program Literasi Sekolah Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Sumatera Utara. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*. Vol. 5. No. 2, Juli – Desember 2017
- Hasanah, U., Tarma., Rasha., Nugraheni, P.L. 2018. *Penyuluhan Family Literacy Sebagai Stimulasi Untuk Meningkatkan Literasi Budaya Pada Masyarakat Wilayah Candi Batujaya Karawang*. Universitas Negeri Jakarta: Jakarta
- Hyland, N & Kranzow, J. 2011. Faculty And Student Views Of Using Digital Tools To Enhance Self-Directed Learning And Critical Thinking. *International Journal of Self- Directed Learning* Volume 8, Number 2, Diakses pada tanggal 4 Januari 2017 dari : sdlglobal.com/IJSDL/IJSDL8.2.pdf

- Indrawan, I. 2015. *Pengantar manajemen sarana dan prasarana sekolah*. Deepublish.
- Jogani, Chitra. (2015). Schooling Infrastructure and Literacy-Evidence from a National Education Mission in India. *The Future of Children*. Vol. 28 No. 2. (2015).
- Jossberger, et al. 2010. The Challenge of Self-Directed and Self-Regulated Learning in Vocational Education : A Theoretical Analysis and Synthesis of Requirements. *Journal of Vocational Education and Training*, Faculty of Psychology, Maastricht University. Diakses pada tanggal 4 Januari 2017. Dari : www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/013636820.2010.523479.
- Kemendikbud, R.I., 2018. Desain induk gerakan literasi sekolah. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (E-Book) Diakses tanggal 3 Juli 2020.
- Kemendikbud. 2016. *Jendela Pendidikan dan Kebudayaan*. Media komunikasi dan Inspirasi vol VI/oktober-2016. (online). Diakses tanggal 15 Desember 2018
- Kemendikbud. 2016. *Panduan Gerakan Literasi Sekolah Di Sekolah Menengah Atas* : Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (E-book) Diakses tanggal 15 Desember 2018.
- Kemendikbud. 2017. *Panduan Gerakan Literasi Nasional*. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (E-book) Diakses tanggal 15 Desember 2018.
- Kern, Richard. 2000. *Literacy and Language Teaching*. Oxford University Press. New York.
- Knowles, M. S. 1975. *Self-directed learning: A guide for learners and teachers* (Vol. 2, No. 2, p. 135). New York: Association Press.
- Ladell-Thomas, J. 2012. Do-it-yourself information literacy: Self-directed learning at a distance. *Journal of library & information services in distance learning*, 6(3-4), 376-386.

- Lai, H. J. 2011. The influence of adult learners' self-directed learning readiness and network literacy on online learning effectiveness: A study of civil servants in Taiwan. *Journal of Educational Technology & Society*, 14(2), 98-106.
- Long, H. B. 1989. *Self-Directed Learning: Emerging Theory & Practice*. Oklahoma Research Center for Continuing Professional and Higher Education, McCarter Hall, University of Oklahoma, Norman, OK 73037.
- Maharani. 2017. <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/26/14432641/per-hari-rata-rata-orang-indonesia-hanya-baca-buku-kurang-dari-sejam>. Diakses 17 Desember 2018
- Mardapi, D. 2008. *Teknik Penyusunan Instrumen dan Nontes*. Yogyakarta: Mitra Cendikia Offset.
- Megasari, R. 2014. Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMPN 5 Bukittinggi. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 2(1), 636-648.
- Meyer J.P. and Allen N.J. 1991. A three-component conceptualization of organizational commitment. *Human Resources Management Review*. 1(1): 61-89.
- Moretti dan Frandell. 2013. *Literacy from a Right to Education Perspective*. Report of the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization to be submitted to the UN General Assembly at its 68th session
- Muktiono, Joko. D. 2003. *Aku Cinta Buku: Menumbuhkan Minat Baca pada Anak*. Elex: Jakarta
- Mulyasa, E. 2011. *Manajemen Berbasis Sekolah: Kosep, Strategi, Implementasi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Cet. 13, hlm 47
- National Center for Education Statistics (NCES). 2007. National Assessment of Adult Literacy (NAAL). (Online) <https://nces.ed.gov/naal/framework.asp>. Diakses tanggal 15 Desember 2018
- OECD. 2013. *PISA 2012 Results: What Students Know and Can Do: Student Performance in Mathematics, Reading and Science. (Volume 1)*. Paris: PISA- OECD Publishing

- OECD. 2013. *PISA 2012 Results in Focus: What 15year-olds know and what they can do with what they know*. New York: Columbia University
- OECD. 2015. <http://www.oecd.org/pisa/publications/>. Diakses pada 17 Desember 2017
- OECD. 2015. *PISA 2015 Draft Mathematics Framework*. New York: Columbia University
- OECD. 2016. *PISA 2015 Results in Focus*. New York: Columbia University
- Pakpahan R. 2016. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Capaian Literasi Matematika Siswa Indonesia Dalam Pisa 2012. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Vol. 1, Nomor 3, Desember 2016
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Online), Diakses tanggal 15 Desember 2018.
- Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemdikbud. 2012a. *Determinants of Learning Outcomes TIMSS 2011: Final Report*. Jakarta: Pusat Penilaian Pendidikan
- Puspendik. 2012. *Kemampuan Matematika Siswa SMP Indonesia Menurut Benchmark Internasional TIMSS 2011*. Diakses dari laman web tanggal 17 Desember 2018
- Puspitawati H, Herawati T. 2008. *Metode Penelitian Keluarga*. Bogor (ID): IPB Press.
- Peremendikbud no. 69 tahaun 2009 tentang pembiayaan pendidikan
- Permendikbud no 26 Thn 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasioanl Sekolah
- Permendikbud No. 3 Thn 2019 tentang Petunjuk Teknik Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
- Rahayu, T. 2016. Penumbuhan Budi Pekerti Melalui Gerakan Literasi Sekolah.
- Rizal, A. 2014. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Sabutan Kecamatan sabutan Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Negara*. Vol. 2 No. 4

- Sallis, Edward. 2002. *Total Quality Management in Education Third Edition*. London: Kogan Page Ltd. ISBN 0-203-41701-1
- Saputro A.S. 2018. Implementasi Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah Di Sma Negeri 2 Bantul. Prosiding Konferensi Nasional Ke- 7 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah „Aisyiyah (APPPTMA)
- Saracho, O. N. 2002. Family literacy: Exploring family practices. *Early child development and care*, 172(2), 113-122.
- Shiong, K. B., Aris, B., & Tasir, Z. 2009. The Level Of Self-directed Learning Among Teacher Training Institute Students-An Early Survey. *Sains Humanika*, 50(1).
- Senechal, M., & LeFreve, J. 2002. *Parental Involvement in the development of children's reading skill: a five-year longitudinal study*. *Child Development*, 73, 445-460.
- Sudiyono. 2007. Buku Ajar: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: UNY.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sulistyo A. 2017. Evaluasi Program Budaya Membaca Di Sekolah Dasar Negeri. *Jurnal Kelola*. Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2017
- Supriyanto, H. 2017. Implementasi gerakan literasi sekolah dalam menumbuhkan minat membaca siswa. *Wiyata Dharma: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 68-82.
- Sutarno, N. 2006. *Perpustakaan dan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Syafiq, A.R. 2016. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills) di SMKN 1 Trucuk Klaten*. [Skripsi]. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Tampolon, Manahan. 2015. *Perencanaan dan Keuangan Pendidikan*. Jakarta: Mitra Wacana Media. Hlm 233

- Teguh, M. 2017. *Gerakan Literasi Sekolah Dasar*. In Prosiding Seminar Nasional (Vol. 15, pp. 18-26).
- The World's Most Literate Nations (WMLN). 2016 <http://www.ccsu.edu/wmln/>. Diakses 17 Desember 2018
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. (Online), Diakses tanggal 15 Desember 2018.
- UNESCO. 2004. *The Plurality Of Literacy And Its Implications For Policies And Programmes*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.(ebook), <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001362/136246e.pdf>, diakses 8 Oktober 2016.
- UNESCO. 2014. *Literacy for All*. <http://en.unesco.org/themes/literacy-all>. Diakses 17 Desember 2018
- Wahyuni, S., Machfudz, M., & Badrih, M. (2017). Pemberdayaan masyarakat perempuan melalui pemberantasan 'buta aksara'guna menumbuhkembangkan usaha kreatif berbasis literasi dan potensi lokal. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 1(2).
- Wells, B. 1987. *Apprenticeship in Literacy*. Dalam *Interchange* 18,1/2:109-123. Springerlink.
- Wulandari R. 2017. Implementasi Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah Di Sekolah Dasar Islam Terpadu Lukman Al Hakim Internasional. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*. No. 3 Vol.VI Tahun 2017.

GLOSARIUM

E

ekstrakurikuler

kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran yang dilakukan baik di sekolah atau di luar sekolah dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan dan wawasan serta membantu membentuk karakter peserta didik sesuai dengan minat dan bakat masing-masing.

epistemic

suatu filsafat yang berkaitan dengan asal muasal pengetahuan, sifat, dan jenis jenisnya.

G

Gerakan Indonesia Membaca

suatu gerakan yang diinisiasi pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengembangkan masyarakat menjadi aksarawan cerdas, kreatif dan produktif.

Gerakan Literasi Keluarga

suatu program pemberdayaan keluarga yang diinisiasi pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam

meningkatkan minat baca anak.

Gerakan Literasi Masyarakat

suatu program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi bagian dari Gerakan Literasi Nasional untuk menumbuhkan minat baca masyarakat.

Gerakan Literasi Nasional

merupakan induk gerakan literasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Gerakan Literasi Sekolah

suatu gerakan dalam upaya menumbuhkan budi pekerti siswa yang bertujuan agar siswa memiliki budaya membaca dan menulis sehingga tercipta pembelajaran sepanjang hayat.

I

Inference

Suatu keterampilan menggambar teks yang sesuai dengan kesimpulan.
intrakurikuler

suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekolah yang sudah teratur, jelas dan terjadwal dengan sistematis yang merupakan program utama dalam proses mendidik siswa.

K

kokurikuler

suatu kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler, seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya.

konvensi

merupakan aturan-aturan bahasa baik lisan maupun tertulis yang didasarkan pada kebiasaan

L

literate

merupakan orang terpelajar atau orang yang dapat menulis dan membaca dengan baik.

literasi numerasi

pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari dan menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk.

P

performatif

ujaran yang memperlihatkan bahwa suatu perbuatan telah diselesaikan oleh pembicara dan dengan pengungkapannya berarti perbuatan itu diselesaikan pada saat itu juga.

S

self-directed learning

suatu proses di mana individu mengambil inisiatif, dengan atau tanpa bantuan orang lain, dalam mendiagnosis kebutuhan belajar mereka, merumuskan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi sumber dan material untuk belajar, memilih dan menerapkan strategi pembelajaran yang tepat, dan mengevaluasi hasil belajar.

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) telah diselenggarakan sejak 2016. Sebagai sebuah gerakan untuk meningkatkan aktivitas dan kemampuan literasi siswa, penyelenggaraan GLS dipengaruhi oleh banyak faktor. Hasil analisis dalam buku ini menunjukkan beberapa faktor yang turut menghambat ketercapaian implementasi GLS. Pertama, peran kepala sekolah sejauh ini telah memiliki komitmen dalam menerapkan GLS, tetapi masih pada taraf melaksanakan sesuai ketentuan dan belum sampai pada taraf memberikan inovasi. Kedua, minimnya dukungan keluarga dalam melaksanakan kegiatan literasi di rumah. Ketiga, *self-directed learning* yaitu keinginan belajar siswa secara mandiri yang ternyata masih dalam taraf biasa. Hal ini menunjukkan tahap pembiasaan belum maksimal dilakukan sehingga tujuan pada tahap pembiasaan yaitu menumbuhkan minat peserta didik terhadap bacaan belum tercapai. Keempat, partisipasi masyarakat masih cukup rendah, artinya masyarakat belum memiliki kesadaran dan kepedulian dalam pelaksanaan GLS.



Pusat Penelitian Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2020

ISBN 978-602-0792-75-0

